

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT,
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
TERHADAP PENGELOLAAN
DANA KELURAHAN**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Akuntansi Syariah*

Oleh

**SONA INDAH YUSPRA
NIM. 21 406 00012**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT,
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
TERHADAP PENGELOLAAN
DANA KELURAHAN**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Akuntansi Syariah*

Oleh

**SONA INDAH YUSPRA
NIM. 21 406 00012**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT,
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
TERHADAP PENGELOLAAN
DANA KELURAHAN**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Akuntansi Syariah*

Oleh

**SONA INDAH YUSPRA
NIM. 21 406 00012**

PEMBIMBING I



Nofinawati, M.A
NIP. 198211162011012003

PEMBIMBING II



Indah Sari, M.E
NIDN. 2025049403

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

Hal : Skripsi
an. Sona Indah Yuspra

Padangsidempuan, 4 September 2025
Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidempuan

Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi an. Sona Indah Yuspra yang berjudul **“Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan”**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsi-nya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I



Nofinawati, M.A
NIP.198211162011012003

PEMBIMBING II



Indah Sari, M.E
NIDN. 2025049403

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sona Indah Yuspra
NIM : 21 406 00012
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakulta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Pasal 14 Ayat 12 Tahun 2023.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 2 Tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 4 September 2025

Saya yang Menyatakan,




Sona Indah Yuspra

NIM. 21 406 00012

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sona Indah Yuspra
NIM : 21 406 00012
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Hak Bebas Royalty Noneklusif (*Non Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan”**. Dengan Hak Bebas Royalty Noneklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada Tanggal: 4 September 2025
Saya yang Menyatakan,



Sona Indah Yuspra

NIM.21 406 00012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733 Telepon (0634) 22080
Faximile(0634) 24022 Website: uinsyahada.ac

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Sona Indah Yuspra
NIM : 21 406 00012
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan

Ketua

Prof. Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIDN. 2018081802

Sekretaris

Nofinawati, M.A
NIDN. 2016118202

Anggota

Prof. Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIDN. 2018081802

Nofinawati, M.A
NIDN. 2016118202

Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, M.E
NIDN. 2027029303

Assa'adatu Khariyatussolihah, M.Ak
NIDN. 2017029303

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis / 02 Oktober 2025
Pukul : 10.00 – 12.00
Hasil/ Nilai : Lulus / 72,5 (B)
IPK : 3, 76
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

PENGESAHAN


Judul Skripsi : **Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan**

Nama : **Sona Indah Yuspra**
Nim : **21 406 00012**

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Akuntansi Syariah

Padangsidempuan, 05 November 2025
Dekan,




Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Sona Indah Yuspra

NIM : 21 406 00012

Judul Skripsi : Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan

Latar Belakang masalah dalam penelitian ini adalah faktor pertama dalam pengelolaan dana Kelurahan memerlukan partisipasi masyarakat akan tetapi ternyata di Kelurahan Panyanggar hanya diwakili beberapa orang saja dan masalahnya adalah perwakilan yang dipilih tidak hadir dalam musyawarah, sehingga keputusan yang diambil tidak sepenuhnya mewakili aspirasi masyarakat, faktor kedua dalam pengelolaan dana Kelurahan pentingnya transparansi, akan tetapi di Kelurahan Panyanggar masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana dana kelurahan itu digunakan, serta bagaimana kebutuhan dana tersebut dibelanjakan sebab tidak dilaporkan secara terbuka pada masyarakat, faktor ketiga dalam pengelolaan dana Kelurahan adalah akuntabilitas, akan tetapi di Kelurahan Panyanggar kebijakan yang diterapkan belum sepenuhnya terealisasi sepenuhnya dan masih adanya keluhan dari masyarakat. memahami tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kelurahan dan juga tidak banyak mengetahui bagaimana dana kelurahan itu digunakan, serta bagaimana kebutuhan dana tersebut dibelanjakan sebab tidak dilaporkan secara terbuka pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana kelurahan Panyanggar Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*. Sampel penelitian ini adalah masyarakat kelurahan panyanggar yang memiliki kriteria siswa SMA, mahasiswa/i, masyarakat dan aparatur kelurahan dengan sampel sebanyak 99 orang. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 23. Hasil uji parsial dapat disimpulkan bahwa nilai variabel partisipasi masyarakat atau H1 ditolak. Berdasarkan hasil uji parsial dapat disimpulkan bahwa nilai variabel transparansi atau H2 diterima. Berdasarkan hasil uji parsial dapat disimpulkan bahwa nilai variabel akuntabilitas atau H3 ditolak. Berdasarkan hasil uji simultan menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas atau H4 berpengaruh secara simultan terhadap variabel pengelolaan dana.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana

ABSTRACT

Name : Sona Indah Yuspra
Student ID : 21 406 00012
Thesis Title : The Influence of Community Participation, Transparency, and Accountability on Fund Management

The background of this study lies in three main factors. The first is community participation in village fund management, which is essential. However, in Panyanggar Urban Village, participation is limited to only a few representatives, and unfortunately, those selected often do not attend deliberation meetings. As a result, the decisions made do not fully represent the aspirations of the community. The second factor is the importance of transparency. In Panyanggar, many residents are unaware of how the village funds are utilized or how the needs are financed, as there is no open reporting to the public. The third factor is accountability. In the same village, the implemented policies have not been fully realized, and there are still complaints from the public. This indicates a lack of understanding of the importance of transparency and accountability in managing village funds and a lack of information regarding fund allocation and expenditure. This study aims to determine whether community participation, transparency, and accountability affect the management of village funds in Panyanggar Urban Village, Padangsidempuan Utara District, Padangsidempuan City. This research uses a quantitative method with purposive sampling. The sample consists of 99 respondents, including high school students, university students, community members, and village officials. Data processing is conducted using SPSS version 23. Partial test results show that the variable of community participation (H1) is rejected. The transparency variable (H2) is accepted, while the accountability variable (H3) is rejected. Simultaneously, the variables of community participation, transparency, and accountability (H4) significantly influence fund management.

Keywords: Community Participation, Transparency, Accountability, Fund Management.

المخلص

الاسم : سونا إنداه يوسبرا

رقم الطالب : ٢١٤٠٦٠٠٠٠١٢

عنوان البحث : تأثير مشاركة المجتمع والشفافية والمساءلة على إدارة الأموال

الأول هو مشاركة المجتمع في إدارة أموال الحي، وهي. تتمثل خلفية هذه الدراسة في ثلاثة عوامل رئيسية أمر ضروري، إلا أن المشاركة في حي بانينغار تقتصر على عدد قليل من الممثلين، وللأسف فإن هؤلاء لا العامل. يحضرون الاجتماعات التشاورية، مما يجعل القرارات المتخذة لا تعبر بالكامل عن تطلعات المجتمع لا يعرف العديد من السكان في الحي كيف تُستخدم الأموال، أو كيف تُنفق لتلبية. الثاني هو أهمية الشفافية أما العامل الثالث فهو المساءلة، حيث إن السياسات التي. الاحتياجات، وذلك بسبب غياب التقارير المفتوحة وهذا يدل على ضعف الوعي بأهمية. تم تطبيقها لم تُنفذ بالكامل، ولا تزال هناك شكاوى من المواطنين تهدف هذه الدراسة. الشفافية والمساءلة، بالإضافة إلى قلة المعلومات حول كيفية تخصيص الأموال وإنفاقها إلى معرفة ما إذا كانت مشاركة المجتمع، والشفافية، والمساءلة تؤثر على إدارة أموال الحي في بانينغار، استخدمت الدراسة المنهج الكمي، وتم اختيار العينة. منطقة بادانغسيديامبوأن أوتارا، مدينة بادانغسيديامبوأن بطريقة هادفة العينة القصدية، وبلغ عدد العينة ٩٩ شخصاً من طلاب المدارس الثانوية، والطلاب تمت معالجة البيانات باستخدام برنامج إس بي إس إس ٢٣. الجامعيين، وأفراد المجتمع، وموظفي الحي أظهرت نتائج الاختبار الجزئي أن متغير مشاركة المجتمع الفرضية الأولى مرفوض، ومتغير. صادر أما نتائج الاختبار الشامل فقد. الشفافية الفرضية الثانية مقبول، بينما متغير المساءلة الفرضية الثالثة مرفوض أظهرت أن مشاركة المجتمع، والشفافية، والمساءلة الفرضية الرابعة تؤثر بشكل مشترك على إدارة الأموال.

الكلمات المفتاحية: مشاركة المجتمع، الشفافية، المساءلة، إدارة الأموال

KATA PENGANTAR



Syukur *Alhamdulillah*, peneliti panjatkan atas kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala*, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Rasulullah Muhammad *Salallahu Alaihi Wassallam* sebagai tauladan bagi kita semua.

Skripsi ini berjudul: “**Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan**” ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syahada Padangsidimpuan, serta Bapak Prof Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Rukiah, S.E., M.Si., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan, Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, S.E., M.E selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah, serta seluruh aktivitas Akademik UIN Syahada Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN Syahada Padangsidempuan.
4. Ibu Nofinawati, M.A selaku pembimbing I peneliti ucapkan terima kasih banyak, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah Ibu berikan.
5. Ibu Indah Sari, M.E selaku pembimbing II peneliti ucapkan terima kasih banyak, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah Ibu berikan.
6. Bapak Damri Batubara, M.A. selaku dosen Pembimbing Akademik peneliti yang selalu memberi motivasi dan dukungan yang ikhlas kepada peneliti.

7. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan UIN Syahada Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak serta Ibu dosen UIN Syahada Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syahada Padangsidempuan.
9. Teristimewa kepada Ibunda tercinta, yaitu Ibunda Rita Suryani orang yang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, terimakasih untuk semua berkat doa dan dukungan mama saya bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, Mama harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya, *I love you more more and more*.
10. Teman-teman Akuntansi Syariah 1 angkatan 2021, terkhusus kepada Juwita Kartika, Lia Puspita dan Ririn Safitri yang senantiasa menemani peneliti dalam proses perkuliahan sampai dengan selesai.
11. Kepada sahabat saya Pretty Octawifany Simanjuntak yang telah mendukung dan memberikan saya semangat untuk tetap mengerjakan skripsi saya.

Disini peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, 4 September 2025

Peneliti,

Sona Indah Yuspra
NIM. 2140600012

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ـِى.....	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
..... و	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

اَ.....ى.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
ى.....ى.....	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	I dan garis di bawah
و.....و.....	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٱ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama

diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... iv

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... viii

DAFTAR ISI..... xiii

DAFTAR TABEL xv

DAFTAR GAMBAR xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Batasan Masalah.....	10
D. Definisi Operasional Variabel	10
E. Perumusan Masalah	13
F. Tujuan Penelitian.....	13
G. Manfaat Penelitian	14
H. Sistematika Pembahasan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka	17
1. Kerangka Teori.....	17
a. Pengelolaan Dana Kelurahan	17
b. Partisipasi Masyarakat	22
c. Transparansi	27

d. Akuntabilitas	32
e. Teori Agensi	35
B. Penelitian Terdahulu	36
C. Kerangka Berpikir	42
D. Hipotesis	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
1. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44
2. Jenis Penelitian.....	44
3. Populasi dan Sampel	45
4. Sumber Data.....	46
5. Teknik Pengumpulan Data	47
6. Teknis Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	55
B. Deskripsi Data Penelitian	57
C. Karakteristik Responden	69
D. Analisis Data	80
1. Analisis Statistik Deskriptif	80
2. Uji Kaulitas Data.....	82
3. Uji Asumsi Klasik	85
4. Uji Hipotesis	91
E. Pembahasan Hasil Penelitian	95
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	99
B. Implikasi Penelitian.....	100
C. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Defenisi Operasional Variabel	10
Tabel II. 1 Asas-Asas Pengelolaan Dana Kelurahan	21
Tabel II. 2 Penelitian Terdahulu	36
Tabel III. 1 Skala Likert	47
Tabel III. 2 Indikator Variabel	48
Tabel IV.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	58
Tabel IV.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	59
Tabel IV.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	60
Tabel IV.4 Deskripsi Tanggapan Responden Variabel Pengelolaan Dana	62
Tabel IV. 5 Deskripsi Tanggapan Responden Partisipasi Masyarakat	64
Tabel IV. 6 Deskripsi Tanggapan Responden Variabel Transparansi	67
Tabel IV. 7 Deskripsi Tanggapan Responden Variabel Akuntabilitas	70
Tabel IV. 8 Uji Statistik Deskriptif.....	72
Tabel IV.9 Uji Validitas	75
Tabel IV.10 Uji Reliabilitas.....	77
Tabel IV.11 Uji Normalitas	78
Tabel IV.12 Uji Multikolinearitas.....	79
Tabel IV.13 Uji Heteroskedastisitas	80
Tabel IV.14 Uji Analisis Regresi Linear Berganda	81
Tabel IV.15 Uji Parsial	83
Tabel IV.16 Uji Simultan.....	85
Tabel IV.17 Uji Koefisien Determinasi	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Kerangka Berpikir.....	44
Gambar IV. 1 Struktur Organisasi Kelurahan Panyanggar	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di Indonesia didorong dari adanya dinamika yang menuntut perubahan - perubahan disisi pemerintah maupun disisi warga ke depan. Pemerintah dan pemimpin politik di negara diharapkan menjadi lebih demokratis dan efisien dalam pembangunan sumber daya publik. Dalam menjalankan fungsi pelayanan publik lebih tanggap serta mampu menyusun kebijakan program dan hukum yang dapat menjamin hak asasi dan keadilan sosial.

Sejalan dengan harapan baru terhadap peran tersebut, warga juga diharapkan untuk menjadi warga yang memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya lebih terinformasi memiliki solidaritas terhadap sesama, bersedia berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan urusan publik, memiliki kemampuan untuk berurusan dengan pemerintah dan institusi publik lainnya, tidak apatis, serta tidak mementingkan diri sendiri. Dalam rangka mempercepat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang mengenai pemerintahan daerah yang mengatur otonomi daerah. Sehingga daerah dapat mengurus rumah tangganya masing-masing, namun tetap dalam koridor perundang-undangan.

Kewenangan Otonomi Daerah adalah keseluruhan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan seperti perencanaan, perijinan, pelaksanaan dan lain sebagainya, kecuali kewenangan dibidang-bidang pertahanan keamanan, peradilan, Politik luar Negeri, Moneter/Fiskal dan agama serta kewenangan

lainnya yang diatur oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi. Penyelenggaraan Otonomi pada tingkat propinsi meliputi kewenangan-kewenangan lintas Kabupaten dan Kota dan kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan Daerah Otonomi Kabupaten dan Kota serta kewenangan bidang Pemerintahan lainnya.¹

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, menyebutkan bahwa definisi dari kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. Sementara itu, keuangan kelurahan berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya, bantuan pemerintah baik itu Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun bantuan dari pihak ketiga, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Selanjutnya pemerintah merealisasikan tuntutan Kelurahan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, yang di dalamnya mencakup dukungan kepada pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi kelurah.² Pasal 30 ayat (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Dan ayat (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan ke dalam

¹ Jefri Harianto Nababan and Rina S. Shahrullah, "Peranan Otonomi Daerah Terhadap Pembangunan Ekonomi Melalui Pengelolaan Keuangan Daerah," *Journal of Law and Policy Transformation*, Vol. 6, no. 2 (2022).

² Rafid Husnawijaya and A Zarkasi, "Tinjauan Komperatif Pembentukan Pemekaran Kecamatan Antara Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 3, no. 1 (2023): 100–110.

anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Mengacu pada PP Nomor 17 Tahun 2018 tersebut, alokasi Dana Kelurahan berasal dari APBD minimal 5 persen setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Kemudian dalam pasal 30 ayat 8 tentang Pendanaan Kelurahan menjelaskan bahwa untuk daerah kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa, alokasi anggaran kelurahan paling sedikit sebesar alokasi dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/ kota.³

Tujuan diluncurkannya dana kelurahan ini untuk menunjang pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat. Seperti membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik bidang pendidikan, kebudayaan, sosial, kesehatan maupun transportasi. Oleh karena itu, penggunaan dana kelurahan ini seharusnya diketahui warganya, baik peruntukannya hingga jumlah atau besarnya. Dengan transparansi dana yang ada, serta dipublikasikan kepada warganya, tentunya menekan celah penyalahgunaan uang rakyat tersebut.⁴

Oleh sebab itu dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan, pengelolaan keuangan yang ada di kelurahan yakni dana kelurahan dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Prinsip-prinsip pengelolaan

³ Pradono Girsang and Ilmiawan Auwalin, "Evaluasi Dampak Dana Kelurahan Terhadap Tingkat Kemiskinan Perkotaan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 7, no. 3 (2023): 1147–61.

⁴ Suci Flambonita et al., "Pengelolaan Dan Informasi Perencanaan Anggaran Desa," *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat* 5, no. 4 (2022): 378–94.

anggaran harus dikedepankan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Kelurahan harus dilakukan lurah bersama seluruh *stakeholder* kelurahan. Tujuannya untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dan penyelewengan. Dana Kelurahan juga harus direncanakan secara partisipatif, masyarakat harus dilibatkan secara aktif agar dana kelurahan dimanfaatkan dengan baik, efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁵ Di kelurahan Panyanggar, permasalahannya terdapat dalam perencanaan pengelolaan dananya ternyata belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi, yaitu partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas.

Kecamatan Padangsidimpuan Utara adalah salah satu kecamatan dari enam kecamatan di Kota Padangsidimpuan dan berjarak 0,2 km dari Ibu Kota Padangsidimpuan. Secara administratif kecamatan Padangsidimpuan Utara berbatasan dengan Padangsidimpuan Hutaimbaru di Sebelah Utara, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan disebelah Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan disebelah Barat dan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua disebelah Timur.

Pada awal terbentuknya kecamatan Padangsidimpuan Utara terdiri dari 12 kelurahan. Pada tahun 2005 daerah kota Padangsidimpuan dimekarkan menjadi 6 kecamatan dan kecamatan Padangsidimpuan Utara dimekarkan menjadi 16 Kelurahan, yang termasuk Kelurahan Padangsidimpuan Utara adalah Kelurahan Wek I, Kelurahan Wek II, Kelurahan Wek III, Kelurahan Wek IV, Kelurahan Tanobato, Kelurahan Tobat, Kelurahan Batang Ayumi Jae, Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kelurahan Sadabuan, Kelurahan Panyanggar, Kelurahan Bonan

⁵ Nuriya Firanti and Sarwenda Biduri, "Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Indonesia Tidak Lengkap Tanpa Partisipasi Masyarakat," *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Dan Masyarakat* 1, no. 3 (2024): 17, <https://doi.org/10.47134/jpem.v1i3.281>.

Dolok, Kelurahan Losung Batu, Kelurahan Timbangan, Kelurahan Bincar, Kelurahan Kantin, Kelurahan Kayu Ombun. Kelurahan panyanggar merupakan kelurahan yang memiliki 3 lingkungan yang berjumlah 6.600 jiwa.

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Khoiruddin, A.Md. selaku lurah kelurahan panyanggar. Bapak khoiruddin mengatakan:

“Jumlah masyarakat Kelurahan Panyanggar diperkirakan sekitar 6.600 jiwa, yang terdiri dari 3 lingkungan. Lingkungan ketiga merupakan hasil pemekaran yang baru berlangsung sekitar 8 bulan. Dana kelurahan ini tercantum dalam kegiatan kecamatan. Sebelum melaksanakan program, kami melakukan musyawarah kelurahan (muskel) terlebih dahulu. Dana kelurahan yang tersedia pada tahun 2023-2024 sekitar Rp200 juta. Sebesar 40% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, seperti pengadaan kompor, dandang, dan kursi, yang dilaksanakan berdasarkan hasil muskel. Sementara itu, 60% dana digunakan untuk kegiatan fisik, yang berdasarkan hasil muskel tahun sebelumnya, yaitu pembangunan gang dengan spesifikasi paving block di Lingkungan 1 Kelurahan Panyanggar. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dibentuk melalui badan hukum dan pengangkatannya sesuai dengan hasil muskel. Sebagai lurah, tugas saya adalah memantau, mengidentifikasi, dan melengkapi berkas pencairan dana untuk KSM. Pengawasan dan pengelolaan keuangan juga dilakukan oleh staf lurah, termasuk bendahara yang bertanggung jawab untuk pencairan dana KSM. Musyawarah kelurahan diwakili oleh beberapa orang, seperti pemuka adat dan tokoh masyarakat, karena tidak memungkinkan untuk mengundang semua warga karena keterbatasan dana untuk rapat. Namun, masalahnya adalah terkadang perwakilan yang dipilih tidak hadir dalam musyawarah, sehingga keputusan yang diambil tidak sepenuhnya mewakili aspirasi masyarakat. Realisasi kegiatan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Untuk tahap pencairan dana, KSM yang lebih mengetahui detailnya, namun saya pernah mendengar bahwa pencairan tahap pertama dan kedua telah mencapai 50% dan 50%.”⁶

Di dalam kelurahan jika masyarakatnya tidak percaya terhadap pemerintah kelurahan, program yang sudah disepakati ketika musyawarah kelurahan juga tidak akan berjalan dengan lancar karena dukungan bantuan dan partisipasi

⁶ Khoiruddin, Lurah Panyanggar, *wawancara* (Panyanggar, 21 Maret 2025. Pukul 15.00 WIB).

masyarakat sangat penting dan dibutuhkan, apabila partisipasi dari masyarakat kurang maka pembangunan juga tidak akan terlaksana karena minimnya sumber daya manusia dan juga pemerintah kelurahan tidak tahu akan kebutuhan dan kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat.⁷

Pada tahap pelaksanaan, di Kelurahan Panyanggar Kota Padangsidimpuan tidak membuat papan informasi di depan kantor lurah, lurah tidak membuat papan informasi setiap kegiatan, sehingga masyarakat tidak dapat melakukan pengawasan penggunaan anggaran dana kelurahan, karena tidak mengetahui berapa dana yang masuk dari provinsi dan berapa dana yang masuk dari kabupaten.

Banyaknya kasus penyimpangan terkait pengelolaan dana kelurahan, dalam hal ini pemerintah dituntut untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah kelurahan, masyarakat maupun tenaga pendamping lurah dan yang tidak kalah penting adalah perbaikan dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan kelurahan yang didalamnya terdapat dana kelurahan. Menurut pusat pengembangan akuntansi pemerintahan pengelolaan dana kelurahan adalah suatu proses yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban dalam penggunaan dana kelurahan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Secara teori, ada

⁷ Rhesca Anugrah Amulia, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Desa" 15 (2021): 1–11.

beberapa variabel yang mempengaruhi pengelolaan dana kelurahan, antara lain partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas.⁸

Faktor pertama yang mempengaruhi pengelolaan dana kelurahan yaitu partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam membuat keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Faktanya yang terjadi dikelurahan panyanggar adalah adanya perwakilan dari masyarakat tetapi tidak mewakili dari ketiga lingkungan kelurahan dan hasil dari keputusan musyawarah kelurahan (muskel) tidak sepenuhnya diketahui oleh masyarakat.

“Musyawarah kelurahan hanya diwakili oleh beberapa orang saja, seperti pemuka adat dan tokoh-tokoh masyarakat. Hal ini karena tidak mungkin mengundang semua warga karena keterbatasan dana untuk rapat. Namun, masalahnya adalah terkadang perwakilan yang dipilih tidak hadir dalam musyawarah, sehingga keputusan yang diambil tidak sepenuhnya mewakili aspirasi masyarakat.”⁹

Faktor kedua yang mempengaruhi pengelolaan dana kelurahan yaitu transparansi. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Faktanya yang terjadi dikelurahan panyanggar tidak adanya keterbukaan pengelolaan dana melalui papan informasi.

⁸ Jamaluddin Majid et al., “Partisipasi Masyarakat Sebagai Wujud Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics* 2, no. 1 (2022): 33–46.

⁹ Khoiruddin, Lurah Panyanggar, *wawancara* (Panyanggar, 21 Maret 2025. Pukul 15.00 WIB).

“Saya tidak ikut musyawarah kelurahan, tapi biasanya musyawarah kelurahan membahas tentang program-program pemerintah kelurahan yang bermanfaat bagi masyarakat. Saya mendapatkan informasi hasil musyawarah kelurahan dari saudara saya yang ikut. Namun, saya juga ingin ikut dalam musyawarah dan ingin tahu apa yang dibahas dan diputuskan tentang kelurahan ini, dan saya juga ingin berpartisipasi menyampaikan pendapat. Jika hanya sebagian warga yang ikut, informasi yang didapat hanya dari mulut ke mulut karena pemerintah kelurahan tidak transparan. Saya berharap pemerintah kelurahan Panyanggar dapat lebih terbuka dalam membuat keputusan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.”¹⁰

Faktor ketiga yang mempengaruhi pengelolaan dana kelurahan yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan *good governance* dan merupakan tantangan bagi pemerintah untuk dapat mempertanggungjawabkan dan selalu terbuka kepada masyarakat dalam pelaksanaan program atau kegiatan serta kebijakan yang ditetapkan. Faktanya yang terjadi di kelurahan panyanggar adalah bahwa pelaksanaan program atau kegiatan serta kebijakan yang diterapkan belum terealisasi sepenuhnya di kelurahan panyanggar karena masih adanya keluhan dari masyarakat.

“Untuk musyawarah kelurahan, saya tidak ikut serta secara langsung. Yang ikut serta biasanya adalah orang-orang penting seperti pemuka adat dan tokoh masyarakat. Informasi mengenai hasil musyawarah saya dapatkan secara tidak langsung, yaitu melalui kabar dari mulut ke mulut. Saya tidak mengetahui adanya papan informasi resmi yang menampilkan hasil musyawarah tersebut. Mengenai realisasi program, saya merasa bahwa jika ada keluhan dari masyarakat, lurah memang menampungnya. Namun, terkadang solusi yang diberikan tidak sepenuhnya sesuai dengan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Saya tidak mengetahui secara pasti jumlah dana yang digunakan untuk program kelurahan. Namun, saya tahu bahwa dana tersebut digunakan untuk pembangunan gang dan pemberdayaan masyarakat. Saya tidak memiliki informasi lebih lanjut mengenai penggunaan dana tersebut.”¹¹

¹⁰ Fany, Warga Panyanggar, wawancara (Panyanggar, 6 Mei 2025. Pukul 19.30 WIB).

¹¹ Wita, Warga Panyanggar, wawancara (Panyanggar, 22 Maret 2025. Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan hasil review penelitian terdahulu di atas maka ditemukan adanya research gap berupa inkonsistensi (tidak konsisten) hasil penelitian. Bahwa tidak selalu pengelolaan dana publik dipengaruhi oleh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian maka peneliti tertarik untuk kembali melakukan penelitian tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan dana kelurahan dengan mengambil Kelurahan Panyanggar, Kota Padangsidimpuan.

Adapun penelitian tentang isu ini pernah diteliti oleh Elisa Rama Yanti, Wiralestari dan Wiwik Tiswiyanti¹² hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Secara parsial, Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa, sedangkan Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh. Peneliti oleh Rahma Yulita, Nunung Apriani dan Sri Dewi Fitrianiingsih¹³ hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh positif dan signifikan secara simultan maupun secara parsial terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan di Kecamatan Palu Timur. Peneliti oleh Endar Ayu Yusnida dan Mirza

¹² Elisa Rama Yanti, Wiralestari, and Wiwik Tiswiyanti, "Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh)," *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 12, no. 01 (2023): 53–64.

¹³ Rahma Yulita, Nunung Apriani, and Sri Dewi Fitrianiingsih, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan Di Kecamatan Palu Timur," *Jurnal Kolaboratif Sains* Vol. 6, no. No. 12 (2023): 1975–82.

Anindya Pangestika¹⁴ hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan partisipasi masyarakat tidak memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Berdasarkan permasalahan dan adanya perbedaan hasil peneliti di atas maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang bisa diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan dana kelurahan, hanya beberapa orang yang dilibatkan dan tidak mewakili dari ketiga lingkungan kelurahan panyanggar.
2. Tidak adanya papan informasi yang merupakan keterbukaan dalam memberikan informasi mengenai pengelolaan dana kelurahan kepada masyarakat kelurahan panyanggar.
3. Belum sepenuhnya terealisasi program atau kegiatan serta kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan kelurahan panyanggar.

C. Batasan Masalah

Pada dasarnya, setiap penelitian memiliki batasan. Dengan adanya batasan ini, ruang lingkup akan menjadi lebih jelas, sehingga hasil penelitian menjadi

¹⁴ Endar Ayu Yusnida and Mirza Anindya Pangestika, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Se-Kecamatan Bumijawa,” *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi* Volume 8, no. 1 (2024): 25–40.

lebih mudah dipahami dan diikuti. Berdasarkan masalah yang diidentifikasi, pembahasan penelitian selanjutnya akan sangat terbatas pada pengaruh partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana kelurahan. Penelitian ini hanya dilakukan di Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidempuan Utara.

D. Definisi Operasional Variabel

Operasional variabel adalah menemukan sekaligus mengukur variabel lapangan tertentu secara ringkas dan jelas tanpa menimbulkan multitafsir. Penelitian pada tabel di bawah ini menjelaskan variabel penelitian dan indikator yang digunakan untuk melakukan survei.

Tabel I. 1 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
1.	Pengelolaan Dana Kelurahan (Y)	Semua usaha yang berkaitan dengan dana kelurahan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, termasuk dalam pengelolaan dana kelurahan.	1. Pengalokasian sumber daya. 2. Operasional kegiatan mendukung efisiensi dan efektifitas. ¹⁵	Likert
2.	Partisipasi Masyarakat (X1)	Keterlibatan setiap individu dalam suatu pekerjaan yang dimaksudkan	1. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan program-	Likert

¹⁵ Zulfan Saputra, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Lieue Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar," *Pembangunan*, 2023.

		untuk menyelesaikan, menemukan, dan mengambil keputusan pada permasalahan yang sedang dihadapi oleh suatu organisasi, hal ini guna untuk memecahkan masalah yang sedang terjadi.	<p>program kelurahan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mengusulkan rencana anggaran. 3. Terlibat dalam rapat paripurna. 4. Terlibat mengawasi dan melaporkan. 5. Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran. 6. Memberikan penghargaan.¹⁶ 	
3.	Transparansi (X2)	Ketika pemerintah memberi tahu masyarakat tentang bagaimana operasi pengelolaan sumber daya publik dijalankan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan sistem informasi. 2. Aksesibilitas terhadap alokasi dana kelurahan. 3. Publikasi laporan keuangan. 4. Ketersediaan informasi kinerja.¹⁷ 	Likert
4.	Akuntabilitas (X3)	Kewajiban pihak agent (aparatur desa/lurah) kepada pihak principal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan keuangan kelurahan sebagai alat pertanggung jawaban. 	Likert

¹⁶ Zulfan Saputra.

¹⁷ Program Studi Akuntansi And Muhammad Rifqi Ma, "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Kecamatan Brebes) Skripsi Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana S1," 2023.

		(masyarakat) untuk bertanggung jawab, menampilkan, melaporkan, dan mengungkapkan semua tindakan atau kegiatan yang dilakukan olehnya.	2. Pendapatan dan pengeluaran kelurahan dicatat pada laporan keuangan. 3. Laporan keuangan kelurahan disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ¹⁸	
--	--	---	---	--

E. Perumusan Masalah

Berdasarkan adanya permasalahan dan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana kelurahan?
2. Apakah terdapat pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana kelurahan?
3. Apakah terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana kelurahan?
4. Apakah terdapat pengaruh partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas secara simultan terhadap pengelolaan dana kelurahan?

¹⁸ Aldo Fahrezi, "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Tingkat Kepercayaan Donatur Pada Mesjid Jamik Medan Tenggara VII," *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 2022, 39–46, <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/18551>.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana kelurahan.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana kelurahan.
3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana kelurahan.
4. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas secara simultan terhadap pengelolaan dana kelurahan.

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi, akademisi maupun peneliti serupa berikutnya.

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Akademisi

Diharapkan dapat dijadikan salah satu sumbangan data empiris dalam ilmu akuntansi sektor publik dan dapat dijadikan sebagai acuan guna penelitian lanjutan.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi pihak-pihak lain yang meneliti dengan kajian yang sama

yaitu partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana kelurahan panyanggar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kelurahan Panyanggar

Diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam mengelola dana kelurahan bagi perangkat kelurahan dan pengelola keuangan kelurahan terhadap partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana kelurahan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya, serta memberikan gambaran secara sistematis mengenai penelitian ini meliputi:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini bertujuan sebagai pengantar penelitian yang berisikan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, definisi operasional variabel, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN TEORITIK

Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai landasan teori yang digunakan, kajian/penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, validitas keabsahan data, serta prosedur penelitian tindakan.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memaparkan penjelesan mengenai gambaran umum objek penelitian, deskripsi penelitian, analisis data dan temuan penelitian, pembahasan penelitian, serta keterbatasan penelitian.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan keimpulan, implikasi hasil penelitian, dan saran penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Teori

a. Teori Agensi

Teori ini dikemukakan oleh Jensen & Meckling menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yaitu prinsipal dan agen. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika prinsipal dan agen memiliki tujuan yang sama maka agen akan mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh prinsipal. Pertentangan terjadi apabila agen tidak menjalankan perintah prinsipal untuk kepentingannya sendiri.¹⁹

Semakin besar partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat, maka akan semakin efektif pula pengelolaan dana kelurahan, hal tersebut sejalan dengan teori agensi dimana partisipasi masyarakat adalah salah satu evaluasi yang dilakukan prinsipal terhadap kinerja agen. Semakin besar transparansi maka pengelolaan dana kelurahan akan semakin baik, teori keagenan menyebutkan bahwa terdapat asimetri informasi, yaitu suatu kondisi dimana prinsipal tidak mendapatkan informasi yang sama

¹⁹ Harnovinsah, "*Teori Akuntansi*", 2023, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023), hlm. 15-16

seperti agen, maka dengan adanya transparansi yang tinggi, diharapkan prinsipal mendapatkan informasi yang lengkap dan sama dengan agen. Teori keagenan berkaitan dengan variabel akuntabilitas, mengingat bahwa akuntabilitas adalah bentuk tanggung jawab agen (pemerintah kelurahan) atas kegiatan yang dilakukan kepada prinsipal (masyarakat). Semakin baik akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan maka pemerintah kelurahan akan semakin efektif dalam mengelola dana kelurahan.²⁰

Korelasi penelitian ini dengan teori agensi yaitu bahwa aparatur kelurahan bertindak sebagai *agent* yang harus bertanggung jawab atas semua aktivitas yang dilakukan dan meyakinkan serta melaporkan kepada masyarakat selaku pihak *principal*. Masyarakat tentu mengharapkan pencapaian kinerja aparatur kelurahan yang baik. Harapan ini dapat diidentifikasi berdasarkan laporan kinerja keuangan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat, meskipun seberapa baik pelaporan kinerja keuangan dan pelayanan tergantung pada strategi aparatur kelurahan. Jika hasil yang diinginkan dapat tercapai, maka kepercayaan masyarakat kepada aparatur kelurahan akan lebih meningkat.

b. Pengelolaan Dana Kelurahan

1) Pengertian Dana Kelurahan

Dana kelurahan merupakan dana yang berasal dari APBN yang masuk dalam pos Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan. Dana yang

²⁰ Ananda Naufal Zaki, Melati Oktafiyani, and Lenni Yovita, "Jurnal Ekonomi Dan Bisnis" 2, no. 1 (2023): 23–37.

sempat dianggarkan dalam APBN ini ditujukan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasana kelurahan serta kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Dana ini ditujukan sebagai dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan penganggaran bagi kelurahan.²¹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan Pasal 1 ayat (11) disebutkan bahwa Alokasi Anggaran Kelurahan adalah dana yang diberikan kepada kelurahan yang berasal dari dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah tersebut Pasal 68 Ayat (1) Huruf C disebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk kelurahan paling sedikit 5%, yang pembagiannya untuk setiap kelurahan secara proporsional yang merupakan pengelolaan dana kelurahan. Dengan demikian, pengelolaan dana kelurahan merupakan hak kelurahan sebagaimana pemerintah kabupaten/kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pemerintah pusat.²²

²¹ Kementerian Dalam Negeri, “Surat Edaran Nomor 146/2694/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan,” 2019.

²² Christine Monica Saren et al., “Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan Di Kecamatan Aertembaga Kota Bitung,” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"* 13, no. 1 (2022): 101–12.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Peraturan ini mengatur tentang pedoman umum pengelolaan dana kelurahan, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018, pengelolaan keuangan dana kelurahan mencakup seluruh penyelenggaraan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan tanggung jawab keuangan kelurahan. Dengan mengikuti tahapan atau siklus pengelolaan keuangan dana kelurahan, pekerjaan yang lebih baik dapat dilakukan.

Tahapan atau siklus tersebut adalah sebagai berikut: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban.²³

a) Perencanaan

Pemerintah kelurahan dalam menyusun perencanaan pembangunan Kelurahan harus sesuai dengan kewenangannya dan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota. Rencana pembangunan Kelurahan disusun untuk memberikan keterkaitan dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

²³ Fahril Yusuf, "Efektivitas Penggunaan Anggaran Di Kelurahan Cikoro Kabupaten Gowa," *Ayau* 15, no. 1 (2024): 37–48.

b) Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya anggaran yang terdapat pada Kelurahan tersebut telah ditentukan sebelumnya dan timbul pada transaksi atas penerimaan dan pengeluaran Kelurahan. Semua penerimaan dan pengeluaran Kelurahan dalam pelaksanaan kewenangannya dilaksanakan dengan melalui rekening kas Kelurahan. Jika Kelurahan yang belum terdapat pelayanan perbankan di wilayahnya maka akan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

c) Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh bendahara Kelurahan. Bendahara Kelurahan wajib mempertanggungjawabkan dana melalui laporan pertanggungjawaban.²⁴ Laporan pertanggung jawaban disampaikan setiap bulan kepada Lurah.

d) Pertanggung jawaban

Laporan pertanggung jawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan akhir tahun anggaran. Selain laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota, pemerintah kelurahan berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

²⁴ Eriadi Rahima Br Purba, Haryono Umar, Oktafiani Khamilah Siregar, *Model Pengawasan Intern Keuangan Desa: Upaya Pencegahan Tindak Korupsi*, (Merdeka Kreasi Group, 2022), hlm. 20

Dengan terwujudnya pengelolaan sumber daya keuangan kelurahan yang efektif dan efisien, maka pelaksanaan program otonomi daerah akan semakin berhasil, dan pengelolaan kelurahan tersebut dikenal dengan manajemen keuangan kelurahan. Salah satu indeks kesuksesan pembiayaan otonomi daerah adalah bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif dan efisien melalui sumber daya publik dalam mendanai kegiatan pembangunan yang dijalankan.

Anggaran daerah adalah komponen dari pengelolaan keuangan daerah secara garis besar terbagi menjadi dua bagian, yaitu pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan belanja daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan strategi kerja pemerintah daerah dalam mata uang (rupiah) dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Berbagai wujud organisasi, sektor swasta atau sektor masyarakat pasti akan membuat anggaran yang pada dasarnya mewujudkan salah satu cara untuk mewujudkan visi dan misinya. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang harus diikuti, yaitu sebagai sarana pengendalian kebijakan keuangan daerah.²⁵

²⁵Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah*, (Sinar Grafika, 2017), hlm. 150

Berdasarkan pengertian pengelolaan dana kelurahan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan dana kelurahan adalah proses perencanaan, pengalokasian, penggunaan, dan pengawasan dana yang diterima oleh kelurahan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat kelurahan. Pengelolaan dana kelurahan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan.

Berikut ini tabel asas-asas pengelolaan dana kelurahan:

Tabel II. 1 Asas-asas Pengelolaan Dana Kelurahan

Asas-asas	Petunjuk perwujudannya	Mengapa penting?
Transparan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan akses publik pada data 2. Menyebarkan informasi mengenai data keuangan desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya hak masyarakat 2. Menghindari masalah
Akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pertanggungjawaban 2. Data kepada publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh legitimasi masyarakat 2. Memperoleh integrasi publik
Partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterkaitan efektif masyarakat 2. Menyebarkan ruang bagi tugas serta masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya hak masyarakat 2. Tumbuhkan rasa memiliki 3. Meningkatkan keswadayan masyarakat
Tertib dan Disiplin Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata hukum 2. Tepat waktu dan tepat total 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghindari penyimpangan 2. Meningkatkan profesionalitas

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

2) Indikator Untuk Mengukur Pengelolaan Dana

Adapun beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana kelurahan antara lain:

- a) Pengalokasian sumber daya
- b) Operasional kegiatan mendukung efisiensi dan efektifitas

c. Partisipasi Masyarakat

1) Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.²⁶

Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban seorang warga Negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok. Sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pengelolaan pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreatifnya.

Masyarakat kelurahan perlu dilibatkan dalam proses evaluasi pengelolaan dana kelurahan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Keterlibatan masyarakat dalam mendukung program kerja dan menyelesaikan kegiatan dapat disebut sebagai kontribusi masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan

²⁶ Darma Sabri et al., *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Konteks Perencanaan Pembangunan*, (Syiah Kuala University Press, 2024), hlm. 65

memanfaatkan kemampuan serta inisiatif mereka, kegiatan yang dilakukan dapat lebih efektif dan membantu mencapai tujuan yang diinginkan.²⁷

Berkaitan dengan proses pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan yang meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Maka dengan demikian, partisipasi masyarakat mempunyai peran yang sangat penting untuk mendorong proses penyelenggaraan pemerintah yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pengertian partisipasi masyarakat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan kepentingan masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan dana, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga lainnya.

²⁷ Periansya., Sopiyan, A, R. (2020). "Dampak kompetensi dan partisipasi masyarakat Terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa kecamatan rambutan banyuasin". *Jurnal Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya*, 21, ISSN: 2579-969.

2) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dipengaruhi beberapa faktor, berikut beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu:²⁸

- a) Faktor Internal, meliputi karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi pada suatu kegiatan. Karakteristik individu meliputi umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, jumlah pendapatan, pengalaman berkelompok.
- b) Faktor Eksternal, mencakup hubungan yang terjalin diantara pihak pengelola proyek dengan target yang dapat mempengaruhi partisipasi karena target akan dengan sukarela terlibat dalam sebuah proyek, jika sambutan pihak pengelola positif dan menguntungkan mereka. Disamping itu jika didukung menggunakan pelayanan pengelola kegiatan yang positif dan tepat dibutuhkan oleh target, oleh karena itu target tersebut tidak akan sungkan untuk dapat berpartisipasi dalam proyek.

3) Indikator Untuk Mengukur Partisipasi Masyarakat

Adapun beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana kelurahan antara lain:

- a) Keterlibatan dalam pengambilan keputusan program-program kelurahan.
- b) Mengusulkan rencana anggaran.

²⁸ Zulfan Saputra, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Lieue Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar."

- c) Terlibat dalam rapat paripura.
 - d) Terlibat mengawasi dan melaporkan.
 - e) Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran.
 - f) Memberikan penghargaan
- 4) Partisipasi Dalam Perspektif Islam

Islam memandang partisipasi masyarakat sebagai sebuah sistem yang individunya saling membutuhkan dan saling mendukung dalam membangun ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan Hadits. Antar individu masyarakat mempunyai hubungan yang idealnya saling menguntungkan. Kesenjangan dalam hal pendapatan ekonomi merupakan sebuah potensi yang dapat dimanfaatkan guna memupuk kerukunan dan silaturahmi antar sesama.

Islam mendorong partisipasi masyarakat dengan berpegang pada 3 prinsip utama yaitu Prinsip ukhuwwah²⁹, Prinsip ta'awun, dan Prinsip persamaan derajat. Hal ini berasal dari rasa persaudaraan yang tumbuh dari iktan ukhuwwah, seba gaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Mujadilah ayat 11:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

11. Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan:

²⁹ Abu Bakar, M M, "Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial," *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2020): 233–49.

"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, serta menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan, kita dapat menjadi bagian dari umat yang terbaik dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

d. Transparansi

1) Pengertian Transparansi

Transparansi masih menjadi barang mewah sehingga tidak semua orang dapat menikmatinya. Padahal transparansi menjadi salah satu ukuran penting dari good governance. Governance dinilai baik atau buruk, salah satunya ditentukan oleh tingkat transparansi di dalam pemerintahan.³⁰ Transparansi tidak hanya dianggap penting dalam penyelenggaraan pemerintahan tetapi juga dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Warga seringkali tidak memiliki akses terhadap informasi mengenai berbagai hal yang terkait dengan pelayanan publik yang mereka perlukan. Transparansi harus dilakukan pada seluruh aspek manajemen pelayanan publik, meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/ pengendalian dan laporan hasil kinerjanya. Transparansi hendaknya dimulai dari proses

³⁰ Ph.D Dr. Tiomy Butsianto Adi, S.E., M.Si, Muh. Irfandy Azis, S.E., M.Acc., *Standar Akuntansi Pemerintahan*, (Takaza Innovatix Labs, 2025), hlm. 10

perencanaan pengembangan pelayanan publik karena kepastian pelayanan bagi masyarakat umum yang memerlukan dan yang berhak atas pelayanan.

Transparansi merupakan salah satu karakteristik dari *Good Governance*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berlaku dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Pendapat lain mengatakan transparansi adalah keterbukaan informasi baik dalam pengambilan keputusan maupun pengungkapan informasi yang material yang relevan dengan perusahaan.

Selain itu, transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.³¹ Transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap

³¹ Miftakhul Qak and Nur Holifah, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan Di Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya," *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)* 4, no. 1 (2024): 49–59, <https://doi.org/10.38156/jisp.v4i1.226>.

pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip *check and balance*. Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik di mana pemerintah harus memberikan informasi akurat bagi publik yang membutuhkan.

Jika dilihat dari definisi dan kriteria, tidak ada kriteria yang jelas mengenai seperti apa bentuk laporan keuangan itu sehingga sebuah laporan keuangan dapat disebut sebagai laporan keuangan yang transparan. Definisi dan kriteria tersebut hanya mencakup transparansi dalam pengelolaan keuangan, bukan laporan keuangan. Laporan keuangan memang merupakan salah satu hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Hal ini berarti laporan keuangan yang disusun pun harus memenuhi syarat transparansi. Kriteria dari transparansi ini adalah adanya pertanggungjawaban terbuka, adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan serta adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja.³²

Ada 6 prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) yaitu:

- a) Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program).

³² Sitepu Putranta Andres, "*Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*", (CV. Azka Pustaka, 2022), hlm. 18

- b) Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
- c) Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
- d) Laporan tahunan
- e) Website atau media publikasi organisasi
- f) Pedoman dalam penyebaran informasi organisasi

Berdasarkan pengertian transparansi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah sebagai pembuat, pelaksana serta penanggung jawab dari segala macam kebijakan yang bertujuan untuk kemajuan masyarakat dan masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan untuk kepentingannya. Transparansi yang dikemukakan meliputi pemerintah memberikan akses yang jujur dan benar kepada publik untuk mengetahui berbagai informasi yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran. Setiap masyarakat mempunyai hak dan akses yang sama untuk mendapatkan informasi terkait pengelolaan anggaran.

2) Transparansi Dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, transparansi diartikan sebagai shiddiq yang berarti kejujuran. Islam sangat menjunjung tinggi prinsip transparansi atau prinsip kejujuran dalam segala aspek kehidupan, karena kejujuran

dapat membawa pada kebaikan dan menghindarkan dari segala keburukan, sebagaimana nilai-nilai yang terdapat dalam ekonomi syariah salah satunya adalah keadilan dan mencegah kezaliman, sebab kezaliman dapat menciptakan kecurangan. Kejujuran (shiddiq) tersebut adalah suatu kewajiban yang tidak bisa dijalankan tanpa adanya penerapan prinsip transparansi.³³

Transparansi erat kaitannya dengan kejujuran. Ketika menyampaikan informasi, pemberi informasi harus bersikap jujur sehingga tidak ada satu pun hal yang luput dari pengetahuan penerima informasi termasuk harus mengkomunikasikan segala kebijakan yang mereka lakukan kepada pemberi amanah. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 67:

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ

رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝٦٧﴾

67. Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang mengganti iman mereka dengan kekufuran setelah mereka mengetahui kebenaran tidak akan diterima amal perbuatan mereka di dunia dan di akhirat, dan mereka akan termasuk orang-orang yang merugi.

³³ Zulfan Saputra, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Lieue Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar."

3) Indikator Untuk Mengukur Transparansi

Adapun beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana kelurahan antara lain:

- a) Ketersediaan sistem informasi.
- b) Akseibilitas terhadap alokasi dana kelurahan.
- c) Publikasi laporan keuangan.
- d) Ketersediaan informasi kinerja.

e. Akuntabilitas

1) Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban para pemegang kekuasaan (pejabat publik) untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya yang mengatasnamakan publik. Pejabat publik tersebut adalah mereka yang atas nama publik diberi kewenangan politik, keuangan, atau bentuk lain dari kekuasaan. Berdasarkan pengertian tersebut, ada 3 elemen penting dalam akuntabilitas yang bersifat melekat, yaitu: Elemen "*right of authority*"; bahwa akuntabilitas merupakan respons terhadap otoritas yang diberikan. Sehingga pihak yang berkewajiban melakukan akuntabilitas adalah mereka yang memang diberi otoritas. Elemen "*answerability*"/pertanggungjawaban bahwa karena adanya pemberian otoritas, maka sudah menjadi kewajiban penerima otoritas untuk menginformasikan & menjelaskan apa yang mereka lakukan kepada instansi terkait dan publik. Elemen "*enforcement*"

bahwa dalam akuntabilitas ada kapasitas untuk menjatuhkan sanksi dan memberikan ganjaran kepada para pemegang otoritas.³⁴

Dengan demikian ada unsur pihak eksternal dalam elemen ini yang ditempatkan sebagai penilai. Dalam pengertian tersebut, maka akuntabilitas merupakan sebuah proses yang aktif, di mana lembaga- lembaga publik berkewajiban menginformasikan segala sesuatunya untuk melakukan justifikasi terhadap segala bentuk penjangkauan, implementasi dan output yang dihasilkan.

Berdasarkan pengertian akuntabilitas diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban yang memastikan pengelola dana atau pengambil keputusan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Dengan akuntabilitas, pengelola dana wajib memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas keputusan dan tindakan yang diambil, sehingga meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat. Akuntabilitas merupakan elemen kunci dalam pengelolaan dana yang efektif dan bertanggung jawab.

2) Akuntabilitas Dalam Perspektif Islam

Konsep akuntabilitas dalam Islam diturunkan dari dua pijakan utama yaitu konsep tauhid dan konsep kepemilikan. Konsep tauhid adalah penyerahan diri sepenuhnya hanya kepada Allah.

³⁴ Mohd. Hatta Zulhelmy, "*Pokok-Pokok Pikiran Akuntabilitas Islam*", (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2023), hlm. 9-10

Penyerahan diri sepenuhnya bermakna segala aktivitas hidup manusia hanya ditujukan untuk Allah.³⁵ Dengan kata lain, segala aspek kehidupan manusia harus sejalan dengan ketentuan Allah SWT, sebagaimana diatur dalam Al-Quran dan Hadits. Dengan perspektif ini, ketentuan dalam Alquran dan hadits adalah cara hidup seorang muslim. Dilihat dalam pandangan islam, akuntabilitas dijelaskan dalam al-qur'an surah Al-Mudatssir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

38. tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya,

Ayat yang sesuai dengan bentuk akuntabilitas di atas merupakan cara mensosialisasikan atau mengkomunikasikan kepada publik perihal pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, tujuan akuntabilitas ini adalah untuk menelusuri pihak-pihak yang kurang puas terhadap hasil kerja suatu organisasi yang telah dibebankan untuk menjalankan tugasnya.

3) Indikator Untuk Mengukur Akuntabilitas

Adapun beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana kelurahan antara lain:

³⁵ Zulfan Saputra, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Lieue Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar."

- a) Laporan keuangan kelurahan sebagai alat pertanggung jawaban.
- b) Pendapatan dan pengeluaran kelurahan dicatat pada laporan keuangan.
- c) Laporan keuangan kelurahan disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa kajian yang telah dilakukan terkait dengan partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan. Beberapa penelitian terdahulu sehubungan dengan penelitian ini diringkas sebagai berikut.

Tabel II. 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1	Nor Hasanah (2022) ³⁶	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa	Hasil analisis menunjukkan akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa dengan perolehan t hitung sebesar 1,834 dengan nilai signifikansi 0,070 lebih besar dari 0,05. Transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa dengan perolehan t hitung sebesar 2,859 dengan nilai signifikansi 0,005 lebih kecil dari 0,05.

³⁶ Nor Hasanah, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa", (Skripsi : UIN WALISONGO Semarang, 2022).

			Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa dengan perolehan t hitung sebesar 5,711 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05.
2	Elisa Rama Yanti (2023) ³⁷	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh)	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Secara parsial, Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa, sedangkan Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh.
3	Rahma Yulita (2023) ³⁸	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan di	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh positif dan signifikan secara simultan maupun secara parsial terhadap Efektivitas Pengelolaan

³⁷ Yanti, Wiralestari, and Tiswiyanti, "Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh)."

³⁸ Yulita, Apriani, and Dewi Fitrianiingsih, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan Di Kecamatan Palu Timur."

		Kecamatan Palu Timur	Keuangan Kelurahan di Kecamatan Palu Timur.
4	Endar Ayu Yusnida (2024) ³⁹	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Se-Kecamatan Bumijawa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan partisipasi masyarakat tidak memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa.
5	Rina Haliza Nasution (2024) ⁴⁰	Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Kelurahan (Studi Kasus Kantor Lurah Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan)	Hasil penelitian menjelaskan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kelurahan Pada Kantor Lurah Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan sudah transparan dan akuntabel terlihat dari proses partisipatif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dengan mengumpulkan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat walaupun pengelolaan anggaran tidak dipublikasikan, transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga melalui keterlibatan aktif masyarakat dan respon positif lurah terhadap kritik serta saran yang diberikan oleh

³⁹ Yusnida and Pangestika, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Se- Kecamatan Bumijawa, 2024"

⁴⁰ Rina Halizah Nasution et al., "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Kelurahan (Studi Kasus Kantor Lurah Karang Berombak , Kecamatan Medan Barat , Kota Medan) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, no. 4 (2024).

			masyarakat dan mereka sudah melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana kelurahan tersebut. Dengan demikian, dana kelurahan dapat digunakan dengan tepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berdaya.
6	Zulfan Saputra (2023) ⁴¹	Pengaruh Akuntabilitas Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Lieue Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap variabel afektivitas pengelolaan dana desa dibuktikan dengan nilai Fhitung > Ftabel yaitu 40,846 > 2,76. Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa dibuktikan dengan nilai Thitung > Ttabel yaitu 2,581 > 2,000. Transparansi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa dibuktikan dengan nilai Thitung > Ttabel yaitu 2,900 > 2,000.

⁴¹ Zulfan Saputra, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Lieue Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar." (Skripsi : UIN AR-RANIRY Banda Aceh, 2023).

			Partisipasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa dibuktikan dengan nilai Thitung > Ttabel yaitu $4,994 > 2,000$.
7	Muhammad Rifqi Ma'mun (2023) ⁴²	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Kecamatan Brebes)	Hasil uji kualitas data pada uji validitas di setiap masing-masing variabel dinyatakan valid. Kemudian hasil uji reliabilitas pada masing-masing variabel dinyatakan reliabel. Hasil uji asumsi klasik pada uji normalitas kolmogorov smirnov terdistribusi normal. Kemudian hasil uji multikolonieritas pada masing-masing variabel independen tidak terjadi multikolonieritas. Lalu hasil uji heteroskedastisitas glejser pada masing-masing variabel independen tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji kelayakan model pada uji f diterima, kemudian nilai r square 11,3%. Hasil uji t pada variabel transparansi dan kompetensi aparat desa diterima, sedangkan variabel akuntabilitas dan partisipasi masyarakat ditolak.

⁴² Rifqi Ma, "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Kecamatan Brebes, 2023)."

Adapun persamaan dan perbedaan ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Nor Hasanah sama-sama meneliti tentang partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas. Perbedaannya terletak pada objeknya.
2. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Elisa Rama Yanti sama-sama meneliti tentang partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas. Perbedaannya terletak pada objeknya.
3. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Rahma Yulita sama-sama meneliti tentang partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas. Perbedaannya terletak pada objeknya.
4. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Endar Ayu Yusnida sama-sama meneliti tentang partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas. Perbedaannya terletak pada objeknya.
5. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Rina Haliza Nasution sama-sama meneliti tentang akuntabilitas dan transparansi. Perbedaannya penelitian ini memiliki variabel partisipasi masyarakat dan perbedaannya juga terletak pada objeknya.
6. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Zulfan Saputra sama-sama meneliti tentang partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas. Perbedaannya terletak pada objeknya.

7. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Muhammad Rifqi Ma'mun sama-sama meneliti tentang partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas. Perbedaannya yaitu peneliti Muhammad Rifqi Ma'mun memiliki variabel kompetensi aparat sedangkan penelitian ini tidak dan perbedaannya juga terletak pada objeknya.

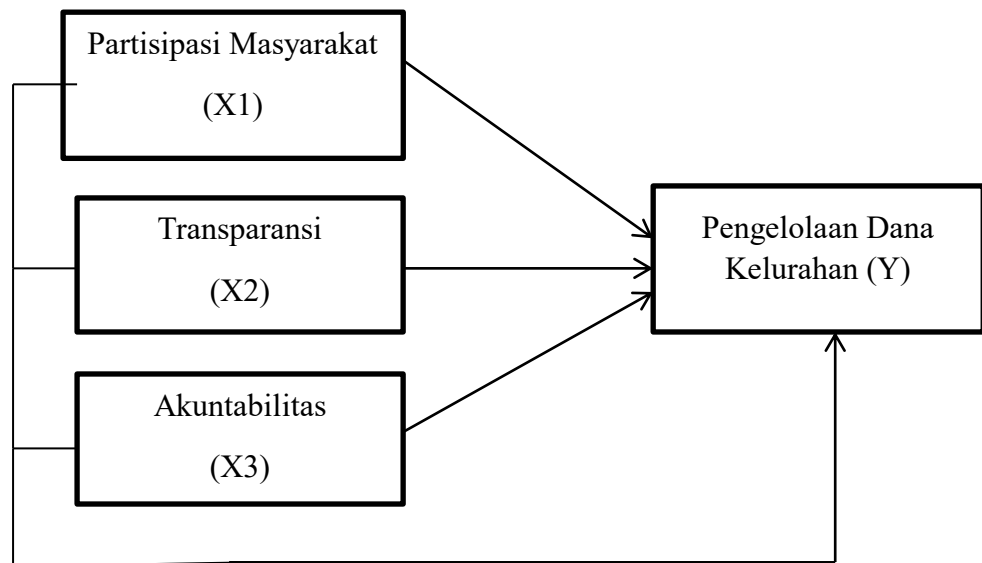
g. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran yang memuat perpaduan antara teori dengan fakta, observasi dan kajian kepustakaan yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Di dalam kerangka berpikir, variabel-variabel penelitian dijelaskan dengan lebih mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁴³

Kerangka pikir pada penelitian ini berupa bagan alur antara variabel partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas dengan pengelolaan keuangan kelurahan.

⁴³ Aninditya Sri Nugraheni, *Bahasa Indonesia Di Perguruan Tinggi Berbasis Pembelajaran Aktif*, 2019. 189

Gambar II. 1 Kerangka Berpikir



h. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji. Pengujian itu bertujuan untuk membuktikan apakah hipotesis diterima atau ditolak.⁴⁴ Adapun hipotesis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah:

H₁: Terdapat pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan

H₂: Terdapat pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan.

H₃: Terdapat pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan.

H₄: Partisipasi Masyarakat, Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan.

⁴⁴ Indra Prasetia, "*Metodologi Penelitian Pendekatan Teori Dan Praktik*", (Medan: UMSU Press, 2022) hlm. 95

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Panyanggar Kota Padangsidempuan, Kecamatan Kota Padangsidempuan Utara. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Januari-Juni 2025.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah pengumpulan dan analisis data numerik untuk deskripsi, penjelasan, produksi atau pengendalian beragam fenomena yang amat menarik.⁴⁵ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif berbasis positivisme yang berguna dalam mempelajari populasi atau sampel tertentu, menggunakan instrumen penelitian dalam mengumpulkan data, dan kemudian melakukan analisis kuantitatif untuk menjelaskan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Filsafat positivisme memandang realitas, gejala dan fenomena sebagai sesuatu yang dihubungkan oleh ikatan kausal dan relatif tetap, konkrit, dapat diamati serta dapat diukur.

⁴⁵ M.Makhrus Ali et al., "Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Penerapannya Dalam Penelitian," *Education Journal*.2022 2, no. 2 (2022): 1–6.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan sebagai wilayah yang dapat digeneralisasikan yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan sifat tertentu⁴⁶.

Populasi dalam penelitian berjumlah 6.600 responden.⁴⁷

2. Sampel

Bagian yang dapat mewakili bentuk dan ukuran populasi disebut sebagai sampel. Oleh karena itu, sampel yang diambil harus representasi populasi atau memiliki kemampuan untuk mewakilinya.⁴⁸ Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah metode pengambilan data yang menggunakan kriteria. Dalam metode ini, peneliti memilih sampel berdasarkan kriteria khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian agar dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dikaji. Pengambilan sampel menggunakan kriteria khusus yang dapat mewakili sehubungan dengan kebutuhan dari indikator variabel penelitian.

Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Siswa SMA
- b) Mahasiswa/i
- c) Masyarakat
- d) Aparatur Kelurahan

⁴⁶ Sandu Siyoto, "*Dasar Metodologi Penelitian*", (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 64

⁴⁷ Khoiruddin, Lurah Panyanggar, *wawancara* (Panyanggar, 21 Maret 2025. Pukul 15.00 WIB).

⁴⁸ I Ketut Swarjana, "*Populasi Sampel, Teknik Sampling & Bias Dalam Penelitian*", 2022.

Dalam penelitian ini untuk menentukan jumlah sampel yaitu dengan menggunakan rumus slovin. Rumus slovin yaitu:

$$n = \frac{N}{1+N(e)}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel/jumlah responden

N = Ukuran populasi

e = Presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir. (biasanya 0,1 atau 10% untuk populasi besar).

Perhitungan rumus slovin dengan menggunakan tingkat kesalahan 10% adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

$$n = \frac{6.600}{1+6.600(0,1)^2}$$

$$n = \frac{6.600}{1+6.600(0,01)}$$

$$n = \frac{6.600}{67}$$

$$n = 98,50 \text{ dibulatkan menjadi } 99$$

Dari perhitungan diatas dapat diperoleh jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 99.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer, yang berarti informasi diperoleh langsung dari sumber atau lokasi penelitian. Data tersebut didapatkan dengan memberikan kuesioner kepada perangkat Kelurahan Panyanggar Kota

Padangsidimpuan. Data primer merupakan data yang dibuat oleh peneliti yang bertujuan khusus dalam menyelesaikan sebuah masalah. Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber pertama objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu kuesioner, wawancara secara langsung atau survei⁴⁹.

E. Teknik Pengumpulan Data

Secara umum, peneliti melaksanakan pengumpulan data untuk memperoleh dan mengumpulkan informasi berdasarkan fakta pendukung yang ada di tempat penelitian serta teknik yang dipilih sangat ditentukan oleh metodologi penelitian yang dipilih oleh peneliti tersebut. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Kuesioner (Angket)

Angket merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respons atas daftar pertanyaan tersebut.

Adapun kisi-kisi angket berdasarkan penelitian ini sebagai berikut:

Tabel III. 1 Skala Likert

Keterangan	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

⁴⁹ Gagah Daruhadi dan Sopiati, "Pengumpulan Data Penelitian," *Jurnal Cendikia Ilmiah* Vol.3, No.5 (2024) hlm. 5430.

Tabel III. 2 Indikator Variabel

No	Variabel	Indikator	No Pernyataan
1	Pengelolaan Dana (Y)	1. Pengalokasian Sumber daya.	1,2,3
		2. Operasional Kegiatan mendukung efisiensi dan efektivitas.	4,5,6
2	Partisipasi Masyarakat (X1)	1. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan program-program kelurahan.	1,2
		2. Mengusulkan rencana anggaran.	3,4
		3. Terlibat dalam rapat paripurna.	5,6
		4. Terlibat mengawasi dan melaporkan.	7,8
		5. Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran.	9,10
		6. Memberikan Penghargaan.	11,12
3	Transparansi (X2)	1. Ketersediaan sistem informasi.	1,2
		2. Aksesibilitas terhadap alokasi dana.	3,4
		3. Publikasi laporan keuangan.	5,6
		4. Ketersediaan informasi kinerja.	7,8
4	Akuntabilitas (X3)	1. Laporan keuangan kelurahan sebagai alat pertanggung jawaban.	1,2
		2. Pendapatan dan pengeluaran kelurahan dicatat pada laporan keuangan.	3,4
		3. Laporan keuangan kelurahan disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	5,6

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengungkapkan informasi secara lisan. Metode wawancara yaitu strategi untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan terorganisir dan tidak terstruktur secara terbuka ditentukan untuk memperoleh data.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis, yang mana dokumentasi ini merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlaku. Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini berbentuk tulisan atau gambar.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan *Statistical Package For Sosial Science* (SPSS) sebagai *software* pembantu. Teknis analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda karena memiliki tiga variabel, diantaranya Y (pengelolaan keuangan kelurahan), X1 (partisipasi masyarakat), X2 (transparansi), dan X3 (akuntabilitas). Teknik analisis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah teknik statistik untuk menganalisis data, yang berarti mendeskripsikan data yang dikumpulkan tanpa menarik kesimpulan yang dapat diterima secara umum. Analisis deskriptif menggunakan nilai rata-rata (mean), varian, standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum, rentang, total, kurtosis, dan skewness untuk memberikan gambaran dan deskripsi data.

Dalam penelitian ini, nilai rata-rata (mean) dari jawaban responden akan digunakan untuk analisis deskriptif.⁵⁰

2. Uji Kaulitas Data

a) Uji Validitas

Uji validitas adalah metode untuk mengevaluasi validitas kuesioner. Sebuah kuesioner dianggap sah atau valid jika dapat menyampaikan ukuran yang diinginkan. Untuk menguji validitas, maka membandingkan nilai rhitung dan rtabel. Jika nilai rhitung $>$ rtabel dan nilainya positif, maka dari setiap poin pertanyaan dikatakan valid dan sebaliknya.⁵¹

b) Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah metrik yang digunakan untuk mengevaluasi kuesioner yang menunjukkan variabel konstruk. Apabila jawaban responden konsisten dari waktu ke waktu terkait pertanyaan yang diberikan, maka kuesioner dianggap dapat diandalkan atau reliabel. Nilai statistik *Cronbach's Alpha* (α) dapat digunakan untuk mengetahui seberapa reliabel suatu variabel. Suatu variabel dianggap handal atau reliabel jika memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,70$.⁵²

⁵⁰ Kurniawan Albert, *Belajar Mudah SPSS Untuk Pemula*, (Yogyakarta: MediaKom, 2009), hlm. 15

⁵¹ Hidayat Alimul Aziz, "Menyusun Instrumen Penelitian & Uji Validitas-Reliabilitas", (Surabaya: Health Books Publishing, 2021) hlm. 12

⁵² Hidayat Alimul Aziz, "Menyusun Instrumen Penelitian & Uji Validitas-Reliabilitas", (Surabaya: Health Books Publishing, 2021) hlm. 12

3. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sebaran data dalam suatu kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas berguna dalam menentukan apakah data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau berasal dari populasi normal. Berikut kriteria pengujian normalitas:

- 1) Jika nilai signifikan $> 0,1$ maka data berdistribusi normal.
- 2) Jika nilai signifikan $< 0,1$ maka data tidak berdistribusi normal.⁵³

b) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antar variabel bebas terhadap variabel terikat menjadi terganggu.

- 1) Jika nilai VIF < 10 atau nilai Tolerance $> 0,10$ maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.
- 2) Jika nilai VIF > 10 atau nilai Tolerance $< 0,10$ maka dinyatakan terjadi multikolinearitas⁵⁴

⁵³ Mariana, *Informasi Akuntansi Dan Keputusan Kredit*, n.d.

⁵⁴ Imas Sumiati Asep Mulyana, Endang Susilawati, Yuniati Fransisca, Marrilyn Arismawati, Fachrul Madrapriya, Debora Tri Oktarina Phety, Afif Hendri Putranto, Euis Fajriyah, Reza Kurniawan, Yoana Nurul Asri, Lisa Astria Milasari, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 2024.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada uji grafik plot, jika pada grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.⁵⁵

d) Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui kekuatan korelasi antara dua atau lebih variabel, maka dapat menggunakan analisis regresi linear berganda. Ini juga dapat menunjukkan bagaimana variabel dependen dan variabel independen berinteraksi satu sama lain⁵⁶. Penelitian ini menggunakan rumus regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Variabel Dependen

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi

X_1, X_2, X_3 = Variabel Independen

ε = Standard error

⁵⁵ Baquandi Lutvi Yoseanto Muhamad Uyun, *Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif*, 2022.

⁵⁶ Firdaus, *"Metodologi Penelitian Kuantitatif"*, (Riau: Dotplus Publisher, 2021).

Dari persamaan regresi linear berganda diatas diperoleh persamaan regresi linear berganda dengan penelitian:

$$PK = \alpha + \beta_1 PM + \beta_2 T + \beta_3 A + \varepsilon$$

Keterangan:

PK = Pengelolaan Dana

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi

PM = Partisipasi Masyarakat

T = Transparansi

A = Akuntabilitas

ε = Standard error

4. Uji Hipotesis

Uji Hipotesis adalah proses untuk melakukan evaluasi kekuatan bukti dari sampel, dan memberikan dasar untuk membuat keputusan terkait dengan populasinya. Uji hipotesis digunakan untuk memutuskan apakah hipotesis yang diuji ditolak atau diterima.⁵⁷

a) Uji Parsial (t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variabel-variabel terikat. Untuk mengetahui apakah koefisien regresi signifikan maka digunakan uji t untuk menguji signifikan konstanta variabel berlaku

⁵⁷ Imam Machali, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: MPI, 2016), hlm. 41

ketentuan sebagai berikut:⁵⁸

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka H_0 ditolak

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ maka H_0 diterima.

b) Uji Simultan (F)

Uji signifikan simultan (Uji Statistik F) yaitu teknik perhitungan yang digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang masuk ke dalam model mempunyai hubungan secara bersama terhadap variabel dependen. Dalam perhitungan uji statistik F memiliki kriteria dalam pengambilan keputusan uji ini yaitu dengan menggunakan nilai F dan dengan nilai signifikansi sebesar 10%, dengan ini model regresi tersebut ditolak dan tidak dapat digunakan. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel.⁵⁹

c) Koefisien Determinasi (R^2)

Sejauh mana model regresi dapat mengungkapkan variasi variabel terikat (dependen) dapat ditentukan dengan menggunakan koefisien determinasi (R^2). Nilai R^2 berada antara nol dan satu.⁶⁰ Jika hasil menunjukkan bahwa nilai R^2 mendekati satu, variabel independen memiliki hampir semua data yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

⁵⁸ Dwi Priyatno, *SPSS 22 Pengelolaan Data Praktis* (Yogyakarta: ANDI 2014), hlm.161

⁵⁹ Sofyan Yamin, *Tutorial statistik spss, lisrel, warpps, & jasp (mudah & aplikatif)*, 2021.

⁶⁰ Mahyu Eka Nanda, *Ekonometrika Dasar Untuk Penelitian di Bidang Ekonomi, Sosial dan Bisnis*, (Jakarta: Mita Wacana Media, 2015), hlm. 62

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Letak Geografis Kelurahan Panyanggar

Lokasi penelitian berada di Kelurahan Panyanggar Kota Padangsidimpuan. Kelurahan Panyanggar adalah salah satu Kelurahan di Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan. Kelurahan Panyanggar berjumlah 6.600 jiwa yang terdiri dari 3 lingkungan yaitu lingkungan I, II dan III. Luas wilayah Kelurahan Panyanggar adalah 378 Ha yang dimanfaatkan sebagai permukiman, perkebunan dan lain sebagainya.⁶¹

Kelurahan Panyanggar ini terletak di pinggir jalan raya Sudirman Kota Padangsidimpuan yang berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Sadabuan, Kayuombun, Timbangan dan Wek I.
- b) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Hanopan dan Partihaman Saroha.
- c) Sebelah selatan berbatasan dengan Wek VI dan Kelurahan Sidangkal.
- d) Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Losung batu dan Sadabuan.

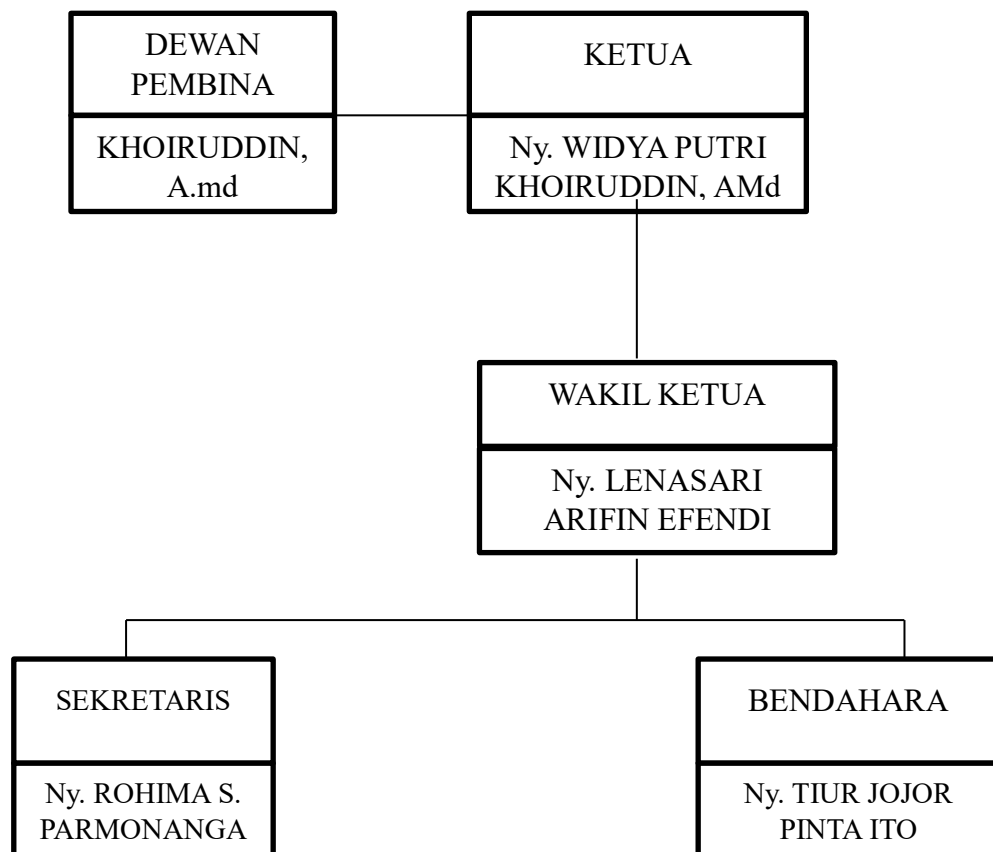
2. Struktur Organisasi Kelurahan Panyanggar

Pemerintahan Kelurahan Panyanggar dalam menjalankan tugas pemerintahan diperlukan kerjasama antar pegawai, tugas dan kewajiban yang kompleks dapat dikerjakan dengan baik apabila dilaksanakan secara bersama-sama dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan sesuai

⁶¹ Khoiruddin, Lurah Panyanggar, *wawancara* (Panyanggar, 21 Maret 2025. Pukul 15.00 WIB).

dengan porsinya. Oleh karena itu, Kelurahan Panyanggar menerapkan susunan organisasi dalam menjalankan tugasnya sebagai kerangka untuk memberikan gambaran yang baik dalam menentukan setiap tugas, wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki pada bagian satu dengan bagian yang lainnya, sehingga tugas pemerintahan dapat dilaksanakan dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Struktur organisasi Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan diantaranya sebagai berikut:

Gambar IV. 1 Struktur Organisasi Kelurahan Panyanggar



Sumber: Kantor Lurah Panyanggar, 2025

3. Visi dan Misi Kelurahan Panyanggar

a. Visi Kelurahan Panyanggar

Visi Kelurahan Panyanggar adalah terwujudnya pelayanan terbaik menuju masyarakat yang partisipatif.

b. Misi Kelurahan Panyanggar

Adapun misi kelurahan Panyanggar adalah:

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil dengan mengedepankan kualitas pelayanan publik sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan sarana dan prasarana yang ada di kelurahan panyanggar.
- 3) Mewujudkan pembangunan masyarakat yang partisipatif, meningkatkan fungsi dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kelurahan.

B. Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usia, jenis kelamin dan pekerjaan. Berdasarkan kuesioner yang disebarkan oleh peneliti kepada masyarakat Kelurahan Panyanggar Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, maka penjelasan dari karakteristik responden sebagai berikut:

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan kuesioner, maka diperoleh data dengan kelompok usia sebagai berikut:

Tabel IV. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Kelompok Usia (Tahun)	Jumlah Responden (Orang)	Persentase
17-30	71	71%
31-40	10	10%
41-50	11	11%
51-60	7	7%
Jumlah	99	99%

Pada data di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 100 responden dalam penelitian ini, mayoritas responden dengan kelompok umur mulai dari 17-30 tahun sebanyak 72 responden, kelompok umur 31-40 tahun sebanyak 10 responden, kelompok umur 41-50 tahun sebanyak 11 responden dan kelompok umur 51-60 tahun sebanyak 7 responden. Dalam penelitian ini, kelompok umur yang dikatakan produktif telah menjawab pertanyaan maupun pernyataan dalam kuesioner ini, yaitu dengan usia yang berkisar antara 17 tahun sampai dengan 60 tahun, yaitu usia sebelum memasuki masa pensiun. Dengan usia yang produktif tersebut, responden dapat menjawab dengan tepat isi dari kuesioner yang telah dibagikan.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dalam penelitian penyebaran kuesioner, maka diperoleh data kelompok jenis kelamin dengan jumlah 99 responden sebagai berikut:

Tabel IV. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden (Orang)	Persentase
Laki-Laki	33	33%
Perempuan	66	66%
Jumlah	99	99%

Pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 100 responden dalam penelitian ini, terdapat responden laki-laki sebanyak 34 orang, dan responden perempuan sebanyak 66 orang. Artinya, responden dalam penelitian ini didominasi oleh perempuan, dimana menurut psikologi perempuan secara umum lebih *responsive*, lebih rapi, dan tepat sasaran dalam menjawab pertanyaan maupun pernyataan.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Dalam penelitian penyebaran kuesioner, diperoleh responden dengan berbagai pekerjaan. Jumlah dan jenis pekerjaan dalam responden penelitian ini sebagai berikut:

Tabel IV. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah Responden (Orang)	Persentase
Siswa SMA	19	19%
Mahasiswa/i	17	17%
Masyarakat	62	62%
Aparatur Kelurahan	2	2%
Jumlah	100	100%

Berdasarkan tabel diatas, didapat bahwa responden dengan siswa SMA sebanyak 19 orang, Mahasiswa/i sebanyak 17 orang, Masyarakat sebanyak 62 orang dan Aparatur Kelurahan sebanyak 2 orang.

C. Deskripsi Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data penelitian dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden yang telah memenuhi kriteria, yaitu masyarakat Kelurahan Panyanggar Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan. Kuesioner tersebut diperoleh peneliti dengan

menyebarkan secara langsung dan memeberikannya kepada responden untuk diisi.

Dalam penyebaran kuesioner ini, Pengambilan data secara langsung dengan menemui responden tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar lebih efektif dalam meningkatkan respon rate dari responden. Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara berkeliling lingkungan kelurahan dan menemui responden yang telah sesuai dengan karakteristik peneliti, hal ini bertujuan agar memudahkan responden dalam pengisian kuesioner. Penyebaran kuesioner tersebut dilaksanakan oleh peneliti pada tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan 29 Juni 2025 dengan pengambilan 99 responden.

1. Variabel Pengelolaan Dana (Y)

**Tabel IV. 4 Deskripsi Tanggapan Responden Masyarakat Variabel
Pengelolaan Dana (Y)**

No	Pernyataan	skor					Jumlah
		STS	TS	N	S	SS	
1	Y1	2	1	3	53	38	97
2	Y2	0	0	2	51	44	97
3	Y3	0	1	2	55	39	97
4	Y4	24	50	13	5	5	97
5	Y5	23	55	14	2	3	97
6	Y6	12	25	16	35	9	97

Sumber : Data Primer diolah, 2025

Variabel pengelolaan Dana (Y) pada penelitian ini diukur menggunakan 2 indikator dengan 6 pernyataan terhadap 97 responden. Pada tabel IV.4 menunjukkan bahwa pernyataan Y1, mengenai pengalokasian sumber daya yang tidak mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dapat menyebabkan kegagalan program dan kegiatan pmbangunan. Jumlah responden yang

menjawab sangat tidak setuju sebanyak 2 orang (2,02%), tidak setuju sebanyak 1 (1,01%) orang, netral 3 (3,03%) orang, setuju 53 (53,54%) orang, dan sangat setuju sebanyak 38 (38,38%) orang. Untuk pernyataan Y2, mengenai pengalokasian sumber daya yang baik dapat membantu mengoptimalkan hasil yang dicapai dalam pembangunan kelurahan. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, netral 2 (2,02%) orang, setuju 51 (51,51%) orang, dan sangat setuju sebanyak 44 (44,45%) orang. Untuk pernyataan Y3, mengenai pengalokasian sumber daya yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kelurahan. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, tidak setuju sebanyak 1 (1,01%) orang, netral 2 (2,02%) orang, setuju 55 (55,56%) orang, dan sangat setuju sebanyak 39 (39,39%) orang.

Untuk pernyataan Y4, mengenai pemerintah kelurahan telah mampu melaksanakan pengelolaan keuangan kelurahan secara ekonomis, efisien dan efektif juga adil merata. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 24 (24,24%) orang, tidak setuju sebanyak 50 (50,50%) orang, netral 13 (13,13%) orang, setuju 5 (5,06%) orang, dan sangat setuju sebanyak 5 (5,05%) orang. Untuk pernyataan Y5, mengenai pengelolaan keuangan kelurahan dilakukan secara terbuka, jujur, akuntabel, ekonomis, efisien dan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 23 (23,23%) orang, tidak setuju sebanyak 55 (55,56%) orang, netral 14 (14,14%) orang, setuju 2 (2,02%) orang, dan sangat

setuju sebanyak 3 (3,03%) orang. Untuk pernyataan Y6, mengenai operasional kegiatan yang tidak di dukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dapat menyebabkan kesalahan dan inefisiensi. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 12 (12,12%) orang, tidak setuju sebanyak 25 (25,26%) orang, netral 16 (16,16%) orang, setuju 35 (35,35%) orang, dan sangat setuju sebanyak 10 (9,09%) orang.

Dari deskripsi jawaban responden untuk variabel pengelolaan dana (Y) diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari masyarakat kelurahan panyanggar lebih memilih untuk menjawab setuju sebagai jawaban tertinggi dengan jumlah 203 jawaban yang digambarkan pada 6 pernyataan pada variabel Pengelolaan Dana (Y) dan jawaban Sangat tidak setuju sebagai jawaban terendah dengan jumlah sebanyak 61 jawaban.

Tabel IV. 5 Deskripsi Tanggapan Responden Aparatur Kelurahan
Variabel Pengelolaan Dana (Y)

No	Pernyataan	skor					Jumlah
		STS	TS	N	S	SS	
1	Y1	0	1	0	0	1	2
2	Y2	0	0	0	0	2	2
3	Y3	0	0	0	0	2	2
4	Y4	0	0	0	1	1	2
5	Y5	0	0	0	0	2	2
6	Y6	0	0	0	1	1	2

Sumber: Data primer diolah, 2025

Variabel pengelolaan Dana (Y) pada penelitian ini diukur menggunakan 2 indikator dengan 6 pernyataan terhadap 2 responden. Pada tabel IV.5 menunjukan bahwa pernyataan Y1, mengenai pengalokasian sumber daya yang tidak mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dapat menyebabkan

kegagalan program dan kegiatan pembangunan. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 orang (0%), tidak setuju sebanyak 1 (1,01%) orang, netral 0 (0%) orang, setuju 0 (0%) orang, dan sangat setuju sebanyak 1 (1,01%) orang. Untuk pernyataan Y2, mengenai pengalokasian sumber daya yang baik dapat membantu mengoptimalkan hasil yang dicapai dalam pembangunan kelurahan. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, netral 0 (0%) orang, setuju 0 (0%) orang, dan sangat setuju sebanyak 2 (2,02%) orang. Untuk pernyataan Y3, mengenai pengalokasian sumber daya yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kelurahan. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, netral 0 (0%) orang, setuju 0 (0%) orang, dan sangat setuju sebanyak 2 (2,02%) orang.

Untuk pernyataan Y4, mengenai pemerintah kelurahan telah mampu melaksanakan pengelolaan keuangan kelurahan secara ekonomis, efisien dan efektif juga adil merata. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, netral 0 (0%) orang, setuju 1 (1,01%) orang, dan sangat setuju sebanyak 1 (1,01%) orang. Untuk pernyataan Y5, mengenai pengelolaan keuangan kelurahan dilakukan secara terbuka, jujur, akuntabel, ekonomis, efisien dan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, netral 0 (0%) orang, setuju 0 (0%) orang, dan sangat setuju sebanyak 2 (2,02%) orang. Untuk

pernyataan Y6, mengenai operasional kegiatan yang tidak di dukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dapat menyebabkan kesalahan dan inefisiensi. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, netral 0 (0%) orang, setuju 1 (1,01%) orang, dan sangat setuju sebanyak 1 (1,01%) orang.

Dari deskripsi jawaban responden untuk variabel pengelolaan dana (Y) diatas dapat disimpulkan bahwa aparat kelurahan panyanggar lebih memilih untuk menjawab sangat setuju sebagai jawaban tertinggi dengan jumlah 9 jawaban yang digambarkan pada 6 pernyataan pada variabel Pengelolaan Dana (Y) dan jawaban tidak setuju sebagai jawaban terendah dengan jumlah sebanyak 1 jawaban.

2. Varibael Partisipasi Masyarakat (X_1)

Tabel IV. 6 Deskripsi Tanggapan Responden Masyarakat Variabel Partisipasi Masyarakat (X_1)

No	Pernyataan	Skor					Jumlah
		STS	TS	N	S	SS	
1	X1.1	9	15	24	38	11	97
2	X1.2	1	2	7	59	28	97
3	X1.3	1	2	6	57	31	97
4	X1.4	1	3	11	53	29	97
5	X1.5	6	11	20	42	18	97
6	X1.6	3	6	23	47	18	97
7	X1.7	13	26	10	28	20	97
8	X1.8	1	3	23	48	22	97
9	X1.9	1	2	11	61	22	97
10	X1.10	0	3	11	46	37	97
11	X1.11	0	2	17	39	39	97
12	X1.12	2	7	18	30	40	97

Sumber: Data primer diolah, 2025

Variabel partisipasi masyarakat (X_1) pada penelitian ini diukur menggunakan 6 indikator dengan 12 pernyataan terhadap 97 responden. Pada tabel IV.6 menunjukkan bahwa pernyataan $X_{1.1}$ mengenai pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 9 (9,10%) orang, tidak setuju sebanyak 15 (15,15%) orang, netral 24 (24,24%) orang, setuju 38 (38,38%) orang, dan sangat setuju sebanyak 11 (11,11%) orang. Untuk pernyataan $X_{1.2}$, mengenai keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan program-program kelurahan dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 (1,01%) orang, tidak setuju sebanyak 2 (2,02%) orang, netral 7 (7,08%) orang, setuju 59 (59,59%) orang, dan sangat setuju sebanyak 28 (28,28%) orang. Untuk pernyataan $X_{1.3}$, mengenai masyarakat memiliki hak untuk mengusulkan rencana anggaran setiap pembangunan maupun dana yang berasal dari kelurahan. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 (1,01%) orang, tidak setuju sebanyak 2 (2,02%) orang, netral 6 (6,07%) orang, setuju 57 (57,57%) orang, dan sangat setuju sebanyak 31 (31,31%) orang. Untuk pernyataan $X_{1.4}$, mengenai mengusulkan rencana anggaran yang tidak realistis dapat menyebabkan kekecewaan dan ketidakpuasan masyarakat. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 (1,01%) orang, tidak setuju sebanyak 3 (3,03%) orang, netral 11 (11,11%) orang, setuju 53 (53,54%) orang, dan sangat setuju sebanyak 29 (29,29%) orang.

Untuk pernyataan X_{1.5}, mengenai masyarakat aktif pada saat pelaksanaan rapat-rapat proses pengambilan keputusan. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 6 (6,07%) orang, tidak setuju sebanyak 11 (11,11%) orang, netral 20 (20,20%) orang, setuju 42 (42,42%) orang, dan sangat setuju sebanyak 18 (18,18%) orang. Untuk pernyataan X_{1.6}, mengenai terlibat dalam rapat dapat membantu meningkatkan partisipasi dan kontribusi dari semua anggota tim atau *stockholder*. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 3 (3,03%) orang, tidak setuju sebanyak 6 (6,06%) orang, netral 23 (23,23%) orang, setuju 47 (47,47%) orang, dan sangat setuju sebanyak 18 (18,18%) orang. Untuk pernyataan X_{1.7}, mengenai melibatkan masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan setiap anggaran. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 13 (13,13%) orang, tidak setuju sebanyak 26 (26,27%) orang, netral 10 (10,10%) orang, setuju 28 (28,28%) orang, dan sangat setuju sebanyak 20 (20,20%) orang. Untuk pernyataan X_{1.8}, mengenai terlibat dalam mengawasi dan melaporkan pengelolaan dana dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 (1,01%) orang, tidak setuju sebanyak 3 (3,03%) orang, netral 23 (23,23%) orang, setuju 48 (48,49%) orang, dan sangat setuju sebanyak 22 (22,22%) orang.

Untuk pernyataan X_{1.9}, mengenai masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses penilaian dan memberikan pendapat tentang bagaimana dana seharusnya dikelola. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1

(1,01%) orang, tidak setuju sebanyak 2 (2,02%) orang, netral 11 (11,11%) orang, setuju 61 (61,61%) orang, dan sangat setuju sebanyak 22 (22,23%) orang. Untuk pernyataan X_{1.10}, mengenai masyarakat dapat memantau dan memberikan penilaian tentang penggunaan dana, apakah sesuai dengan tujuan dan kebutuhan. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, tidak setuju sebanyak 3 (3,03%) orang, netral 11 (11,11%) orang, setuju 46 (46,47%) orang, dan sangat setuju sebanyak 37 (37,37%) orang. Untuk pernyataan X_{1.11}, mengenai memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dengan baik. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, tidak setuju sebanyak 2 (2,02%) orang, netral 17 (17,18%) orang, setuju 39 (39,39%) orang, dan sangat setuju sebanyak 39 (39,39%) orang. Untuk pernyataan X_{1.12}, mengenai memberikan penghargaan kepada pengelola dana dapat meningkatkan kinerja dalam mengelola dana. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 2 (2,02%) orang, tidak setuju sebanyak 7 (7,07%) orang, netral 18 (18,19%) orang, setuju 30 (30,30%) orang, dan sangat setuju sebanyak 40 (40,40%) orang.

Dari deskripsi jawaban responden untuk variabel partisipasi masyarakat (X₁) diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari masyarakat kelurahan panyanggar lebih memilih untuk menjawab setuju sebagai jawaban tertinggi dengan jumlah 548 jawaban yang digambarkan pada 12 pernyataan pada variabel Partisipasi Masyarakat (X₁) dan jawaban Sangat tidak setuju sebagai jawaban terendah dengan jumlah sebanyak 38 jawaban.

Tabel IV. 7 Deskripsi Tanggapan Responden Aparatur Kelurahan**Variabel Partisipasi Masyarakat (X1)**

No	Pernyataan	Skor					Jumlah
		STS	TS	N	S	SS	
1	X1.1	0	0	0	1	1	2
2	X1.2	0	0	1	0	1	2
3	X1.3	0	0	1	0	1	2
4	X1.4	0	0	0	0	2	2
5	X1.5	0	0	1	0	1	2
6	X1.6	0	0	0	1	1	2
7	X1.7	0	0	0	1	1	2
8	X1.8	0	0	0	1	1	2
9	X1.9	0	0	1	0	1	2
10	X1.10	0	0	0	1	1	2
11	X1.11	0	0	0	0	2	2
12	X1.12	0	0	0	0	2	2

Sumber: Data primer diolah, 2025

Variabel partisipasi masyarakat (X_1) pada penelitian ini diukur menggunakan 6 indikator dengan 12 pernyataan terhadap 2 responden. Pada tabel IV.7 menunjukkan bahwa pernyataan $X_{1.1}$ mengenai pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, netral 0 (0%) orang, setuju 1 (1,01%) orang, dan sangat setuju sebanyak 1 (1,01%) orang. Untuk pernyataan $X_{1.2}$, mengenai keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan program-program kelurahan dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, netral 1 (1,01%) orang, setuju 0 (0%) orang, dan sangat setuju sebanyak 1 (0,01%) orang. Untuk pernyataan $X_{1.3}$, mengenai masyarakat memiliki hak untuk mengusulkan rencana

anggaran setiap pembangunan maupun dana yang berasal dari kelurahan. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, netral 1 (0,1%) orang, setuju 0 (0%) orang, dan sangat setuju sebanyak 1 (0,01%) orang. Untuk pernyataan X_{1.4}, mengenai mengusulkan rencana anggaran yang tidak realistis dapat menyebabkan kekecewaan dan ketidakpuasan masyarakat. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, netral 0 (0%) orang, setuju 0 (0%) orang, dan sangat setuju sebanyak 2 (2,02%) orang.

Untuk pernyataan X_{1.5}, mengenai masyarakat aktif pada saat pelaksanaan rapat-rapat proses pengambilan keputusan. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, netral 1 (1,01%) orang, setuju 0 (0%) orang, dan sangat setuju sebanyak 1 (1,01%) orang. Untuk pernyataan X_{1.6}, mengenai terlibat dalam rapat dapat membantu meningkatkan partisipasi dan kontribusi dari semua anggota tim atau *stockholder*. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, netral 0 (0%) orang, setuju 1 (1,01%) orang, dan sangat setuju sebanyak 1 (1,01%) orang. Untuk pernyataan X_{1.7}, mengenai melibatkan masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan setiap anggaran. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, netral 0 (0%) orang, setuju 1 (1,01%) orang, dan sangat setuju sebanyak 1 (1,01%) orang. Untuk pernyataan X_{1.8}, mengenai terlibat dalam mengawasi dan

melaporkan pengelolaan dana dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, netral 0 (0%) orang, setuju 1 (1,01%) orang, dan sangat setuju sebanyak 1 (1,01%) orang.

Untuk pernyataan X_{1.9}, mengenai masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses penilaian dan memberikan pendapat tentang bagaimana dana seharusnya dikelola. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, netral 1 (1,01%) orang, setuju 0 (0%) orang, dan sangat setuju sebanyak 1 (1,01%) orang. Untuk pernyataan X_{1.10}, mengenai masyarakat dapat memantau dan memberikan penilaian tentang penggunaan dana, apakah sesuai dengan tujuan dan kebutuhan. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, netral 0 (0%) orang, setuju 1 (1,01%) orang, dan sangat setuju sebanyak 1 (1,01%) orang. Untuk pernyataan X_{1.11}, mengenai memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dengan baik. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, netral 0 (0%) orang, setuju 0 (0%) orang, dan sangat setuju sebanyak 2 (2,02%) orang. Untuk pernyataan X_{1.12}, mengenai memberikan penghargaan kepada pengelola dana dapat meningkatkan kinerja dalam mengelola dana. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, tidak setuju sebanyak 0

(0%) orang, netral 0 (0%) orang, setuju 0 (0%) orang, dan sangat setuju sebanyak 2 (2,02%) orang.

Dari deskripsi jawaban responden untuk variabel partisipasi masyarakat (X_1) diatas dapat disimpulkan bahwa aparaturnya kelurahan panyanggar lebih memilih untuk menjawab sangat setuju sebagai jawaban tertinggi dengan jumlah 15 jawaban yang digambarkan pada 12 pernyataan pada variabel Partisipasi Masyarakat (X_1) dan jawaban netral sebagai jawaban terendah dengan jumlah sebanyak 4 jawaban.

3. Variabel Transparansi (X_2)

**Tabel IV. 8 Deskripsi Tanggapan Responden Masyarakat Variabel
Transparansi (X_2)**

No	Pernyataan	Skor					Jumlah
		STS	TS	N	S	SS	
1	X2.1	24	29	18	18	8	97
2	X2.2	26	33	25	12	1	97
3	X2.3	16	37	32	10	2	97
4	X2.4	6	16	31	37	7	97
5	X2.5	13	47	25	9	3	97
6	X2.6	2	10	17	49	19	97
7	X2.7	14	35	20	23	5	97
8	X2.8	8	15	24	38	12	97

Sumber: Data primer diolah, 2025

Variabel transparansi (X_2) pada penelitian ini diukur menggunakan 4 indikator dengan 8 pernyataan terhadap 97 responden. Pada tabel IV.8 menunjukan bahwa pernyataan $X_{2.1}$, ketersediaan sistem informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk pengawasan penggunaan dana kelurahan. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 24 (24,24%) orang, tidak setuju sebanyak 29 (29,30%) orang, netral 18 (18,18%) orang,

setuju 18 (18,18%) orang, dan sangat setuju sebanyak 8 (8,08%) orang. Untuk pernyataan X_{2.2}, mengenai sistem informasi tentang keuangan dana kelurahan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat maupun pihak pengguna informasi lainnya baik melalui media elektronik maupun media informasi lainnya. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 26 (26,27%) orang, tidak setuju sebanyak 33 (33,33%) orang, netral 25 (25,25%) orang, setuju 12 (12,12%) orang, dan sangat setuju sebanyak 1 (1,01%) orang. Untuk pernyataan X_{2.3}, mengenai masyarakat mempunyai akses untuk memperoleh informasi tentang alokasi dana kelurahan dengan mudah. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 16 (16,17%) orang, tidak setuju sebanyak 37 (37,37%) orang, netral 32 (32,32%) orang, setuju 10 (10,10%) orang, dan sangat setuju sebanyak 2 (2,02%) orang. Untuk pernyataan X_{2.4}, mengenai saya merasa alokasi dana kelurahan dapat mengakomodasi dan meningkatkan usulan/suara rakyat. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 6 (6,06%) orang, tidak setuju sebanyak 16 (16,17%) orang, netral 31 (31,31%) orang, setuju 37 (37,37%) orang, dan sangat setuju sebanyak 7 (7,07%) orang.

Untuk pernyataan X_{2.5}, mengenai tersedia akses yang mudah untuk memperoleh dokumen publik tentang laporan keuangan. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 13 (13,13%) orang, tidak setuju sebanyak 47 (47,48%) orang, netral 25 (25,25%) orang, setuju 9 (9,09%) orang, dan sangat setuju sebanyak 3 (3,03%) orang. Untuk pernyataan X_{2.6}, mengenai publikasi laporan keuangan harus disajikan dalam format yang

sederhana dan mudah dipahami. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 2 (2,02%) orang, tidak setuju sebanyak 10 (10,10%) orang, netral 17 (17,18%) orang, setuju 49 (49,49%) orang, dan sangat setuju sebanyak 19 (19,19%) orang. Untuk pernyataan $X_{2.7}$, mengenai pemerintah kelurahan sepenuhnya menyadari akan kewajibannya untuk memberikan informasi kinerja keuangan yang terbuka menyeluru dan jujur kepada masyarakat. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 14 (14,14%) orang, tidak setuju sebanyak 35 (35,36,%) orang, netral 20 (20,20%) orang, setuju 23 (23,23%) orang, dan sangat setuju sebanyak 5 (5,05%) orang. Untuk pernyataan $X_{2.8}$, mengenai informasi kinerja pengelolaan dana mencakup semua aspek penting dari pengelolaan dana, seperti penggunaan dana dan hasil yang dicapai. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 8 (8,08%) orang, tidak setuju sebanyak 15 (15,15%) orang, netral 24 (24,24%) orang, setuju 38 (38,39%) orang, dan sangat setuju sebanyak 12 (12,12%) orang.

Dari deskripsi jawaban responden untuk variabel Transparansi (X_2) diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari masyarakat kelurahan panyanggar lebih memilih untuk menjawab tidak setuju sebagai jawaban tertinggi dengan jumlah 222 jawaban yang digambarkan pada 8 pernyataan pada variabel Transparansi (X_2) dan jawaban Sangat setuju sebagai jawaban terendah dengan jumlah sebanyak 57 jawaban.

**Tabel IV. 9 Deskripsi Tanggapan Responden Aparatur Kelurahan Variabel
Transparansi (X₂)**

No	Pernyataan	Skor					Jumlah
		STS	TS	N	S	SS	
1	X2.1	0	0	0	1	1	2
2	X2.2	0	0	0	1	1	2
3	X2.3	0	0	0	1	1	2
4	X2.4	0	0	0	1	1	2
5	X2.5	0	0	0	1	1	2
6	X2.6	0	0	0	0	2	2
7	X2.7	0	0	0	0	2	2
8	X2.8	0	0	0	0	2	2

Sumber: Data primer diolah, 2025

Variabel transparansi (X₂) pada penelitian ini diukur menggunakan 4 indikator dengan 8 pernyataan terhadap 2 responden. Pada tabel IV.9 menunjukkan bahwa pernyataan X_{2.1}, ketersediaan sistem informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk pengawasan penggunaan dana kelurahan. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, netral 0 (0%) orang, setuju 1 (1,01%) orang, dan sangat setuju sebanyak 1 (1,01%) orang. Untuk pernyataan X_{2.2}, mengenai sistem informasi tentang keuangan dana kelurahan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat maupun pihak pengguna informasi lainnya baik melalui media elektronik maupun media informasi lainnya. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, netral 0 (0%) orang, setuju 1 (1,01%) orang, dan sangat setuju sebanyak 1 (1,01%) orang. Untuk pernyataan X_{2.3}, mengenai masyarakat mempunyai akses untuk memperoleh informasi tentang alokasi dana kelurahan dengan mudah. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak

setuju sebanyak 0 (0%) orang, tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, netral 0 (0%) orang, setuju 1 (1,01%) orang, dan sangat setuju sebanyak 1 (1,01%) orang. Untuk pernyataan X_{2.4}, mengenai saya merasa alokasi dana kelurahan dapat mengakomodasi dan meningkatkan usulan/suara rakyat. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, netral 0 (0%) orang, setuju 1 (1,01%) orang, dan sangat setuju sebanyak 1 (1,01%) orang.

Untuk pernyataan X_{2.5}, mengenai tersedia akses yang mudah untuk memperoleh dokumen publik tentang laporan keuangan. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 (13,13%) orang, tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, netral 0 (0%) orang, setuju 1 (1,01%) orang, dan sangat setuju sebanyak 1 (1,01%) orang. Untuk pernyataan X_{2.6}, mengenai publikasi laporan keuangan harus disajikan dalam format yang sederhana dan mudah dipahami. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, netral 0 (0%) orang, setuju 0 (0%) orang, dan sangat setuju sebanyak 2 (2,02%) orang. Untuk pernyataan X_{2.7}, mengenai pemerintah kelurahan sepenuhnya menyadari akan kewajibannya untuk memberikan informasi kinerja keuangan yang terbuka menyeluru dan jujur kepada masyarakat. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, netral 0 (0%) orang, setuju 0 (0%) orang, dan sangat setuju sebanyak 2 (2,02%) orang. Untuk pernyataan X_{2.8}, mengenai informasi kinerja pengelolaan dana mencakup semua aspek penting dari pengelolaan dana, seperti penggunaan

dana dan hasil yang dicapai. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, netral 0 (0%) orang, setuju 0 (0%) orang, dan sangat setuju sebanyak 2 (2,02%) orang.

Dari deskripsi jawaban responden untuk variabel Transparansi (X_2) diatas dapat disimpulkan bahwa aparaturnya kelurahan panyanggar lebih memilih untuk menjawab sangat setuju sebagai jawaban tertinggi dengan jumlah 11 jawaban yang digambarkan pada 8 pernyataan pada variabel Transparansi (X_2) dan jawaban setuju sebagai jawaban terendah dengan jumlah sebanyak 5 jawaban.

4. Variabel Akuntabilitas (X_3)

Tabel IV. 10 Deskripsi Tanggapan Responden Masyarakat Variabel Akuntabilitas (X_3)

No	Pernyataan	Skor					Jumlah
		STS	TS	N	S	SS	
1	X3.1	17	23	20	31	6	97
2	X3.2	12	34	31	16	4	97
3	X3.3	1	8	33	42	13	97
4	X3.4	5	13	13	52	14	97
5	X3.5	3	10	15	52	17	97
6	X3.6	4	12	21	45	15	97

Sumber: Data primer diolah, 2025

Variabel akuntabilitas (X_3) pada penelitian ini diukur menggunakan 3 indikator dengan 6 pernyataan terhadap 97 responden. Pada tabel IV.10 menunjukkan bahwa pernyataan X3.1, mengenai masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi kinerja keuangan kelurahan dengan laporan keuangan pengelolaan dana yang baik. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 17 (17,18%) orang, tidak setuju sebanyak 23 (23,23%) orang, netral 20 (20,20%) orang, setuju 31 (31,31%) orang, dan sangat setuju

sebanyak 6 (6,06%) orang. Untuk pernyataan X3.2, mengenai laporan keuangan pengelolaan dana kelurahan dapat mudah di akses dan dapat disajikan secara rinci, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara cepat dan tepat. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 12 (12,12%) orang, tidak setuju sebanyak 34 (34,34%) orang, netral 31 (31,31%) orang, setuju 16 (16,17%) orang, dan sangat setuju sebanyak 4 (4,04%) orang. Untuk pernyataan X3.3, mengenai pendapatan dan pengeluaran yang akurat dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan laporan keuangan pengelolaan dana. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 (1,01%) orang, tidak setuju sebanyak 8 (0,09%) orang, netral 33 (33,33%) orang, setuju 42 (42,42%) orang, dan sangat setuju sebanyak 13 (13,13%) orang.

Untuk pernyataan X3.4, mengenai pendapatan dan pengeluaran kelurahan diaudit secara teratur untuk memastikan keakuratan dan transparansi. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 5 (5,05%) orang, tidak setuju sebanyak 13 (13,13%) orang, netral 13 (13,13%) orang, setuju 52 (52,52%) orang, dan sangat setuju sebanyak 14 (14,15%) orang. Untuk pernyataan X3.5, laporan keuangan pengelolaan dana kelurahan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 3 (3,03%) orang, tidak setuju sebanyak 10 (10,10%) orang, netral 15 (15,15%) orang, setuju 52 (52,52%) orang, dan sangat setuju sebanyak 17 (17,18%) orang. Untuk pernyataan X3.6, mengenai laporan

keuangan pengelolaan dana disajikan secara tepat waktu dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 4 (4,04%) orang, tidak setuju sebanyak 12 (12,12%) orang, netral 21 (21,21%) orang, setuju 45 (45,46%) orang, dan sangat setuju sebanyak 15 (15,15%) orang.

Dari deskripsi jawaban responden untuk variabel Akuntabilitas (X_3) diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari masyarakat kelurahan panyanggar lebih memilih untuk menjawab setuju sebagai jawaban tertinggi dengan jumlah 238 jawaban yang digambarkan pada 12 pernyataan pada variabel Akuntabilitas (X_3) dan jawaban Sangat tidak setuju sebagai jawaban terendah dengan jumlah sebanyak 42 jawaban.

Tabel IV. 11 Deskripsi Tanggapan Responden Aparatur Kelurahan
Variabel Akuntabilitas (X_3)

No	Pernyataan	Skor					Jumlah
		STS	TS	N	S	SS	
1	X3.1	0	0	0	1	1	2
2	X3.2	0	0	0	1	1	2
3	X3.3	0	0	0	1	1	2
4	X3.4	0	0	0	1	1	2
5	X3.5	0	0	0	0	2	2
6	X3.6	0	0	0	0	2	2

Sumber: Data primer diolah, 2025

Variabel akuntabilitas (X_3) pada penelitian ini diukur menggunakan 3 indikator dengan 6 pernyataan terhadap 2 responden. Pada tabel IV.11 menunjukan bahwa pernyataan X3.1, mengenai masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi kinerja keuangan kelurahan dengan laporan keuangan pengelolaan dana yang baik. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak

setuju sebanyak 0 (0%) orang, tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, netral 0 (0%) orang, setuju 1 (1,01%) orang, dan sangat setuju sebanyak 1 (1,01%) orang. Untuk pernyataan X3.2, mengenai laporan keuangan pengelolaan dana kelurahan dapat mudah di akses dan dapat disajikan secara rinci, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara cepat dan tepat. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, netral 0 (0%) orang, setuju 1 (1,01%) orang, dan sangat setuju sebanyak 1 (1,01%) orang. Untuk pernyataan X3.3, mengenai pendapatan dan pengeluaran yang akurat dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan laporan keuangan pengelolaan dana. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, netral 0 (0%) orang, setuju 1 (1,01%) orang, dan sangat setuju sebanyak 1 (1,01%) orang.

Untuk pernyataan X3.4, mengenai pendapatan dan pengeluaran kelurahan diaudit secara teratur untuk memastikan keakuratan dan transparansi. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, netral 0 (0%) orang, setuju 1 (1,01%) orang, dan sangat setuju sebanyak 1 (1,01%) orang. Untuk pernyataan X3.5, laporan keuangan pengelolaan dana kelurahan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, netral 0 (0%) orang, setuju 0 (0%) orang, dan sangat setuju sebanyak 2 (2,02%) orang. Untuk pernyataan

X3.6, mengenai laporan keuangan pengelolaan dana disajikan secara tepat waktu dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, tidak setuju sebanyak 0 (0%) orang, netral 0 (0%) orang, setuju 0 (0%) orang, dan sangat setuju sebanyak 2 (2,02%) orang.

Dari deskripsi jawaban responden untuk variabel Akuntabilitas (X_3) diatas dapat disimpulkan bahwa aparaturnya kelurahan panyanggar lebih memilih untuk menjawab sangat setuju sebagai jawaban tertinggi dengan jumlah 8 jawaban yang digambarkan pada 12 pernyataan pada variabel Akuntabilitas (X_3) dan jawaban setuju sebagai jawaban terendah dengan jumlah sebanyak 4 jawaban.

D. Analisis Data

Analisis Data adalah proses sistematis untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang bermakna guna mendukung pengambilan keputusan. Proses ini mencakup pengumpulan, pembersihan, pengolahan, interpretasi, dan penyajian data dalam bentuk yang dapat dipahami.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, minimum, dan maksimum. Berikut adalah hasil uji statistik deskriptif :

Tabel IV. 12 Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Partisipasi Masyarakat (X_1)	99	30	60	46,66	5,966
Transparansi (X_2)	99	11	40	22,96	4,840
Akuntabilitas (X_3)	99	9	30	20,14	4,167
Pengelolaan Dana (Y)	99	7	24	14,07	3,198
Valid N (listwise)	99				

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel IV. 12 menunjukkan bahwa n adalah jumlah sampel yaitu sebanyak 99 responden. Masing-masing variabel dijelaskan sebagai berikut:

Variabel Pengelolaan dana (Y) sebagai variabel dependen memiliki nilai minimum sebesar 7 dan nilai maksimal sebesar 24 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 14,07 hal tersebut menunjukkan bahwa Pengelolaan dana cukup memadai. Selanjutnya standar deviasi yang dimiliki sebesar 3,198 lebih kecil dari nilai rata-rata, hal tersebut menunjukkan variasi yang rendah atau perbedaan antara nilai minimum dan nilai maksimum.

Selanjutnya pada variabel Partisipasi Masyarakat (X_1) sebagai variabel independen memiliki nilai minimum sebesar 30 dan nilai maksimum sebesar 60 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 46,66 hal tersebut menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat terhadap pengelolaan dana cukup memadai. Selanjutnya standar deviasi yang dimiliki sebesar 5,966 lebih kecil dari nilai rata-rata, hal tersebut menunjukkan variasi yang rendah atau perbedaan antara nilai minimum dan nilai maksimum.

Selanjutnya pada variabel Transparansi (X_2) sebagai variabel independen memiliki nilai minimum sebesar 11 dan nilai maksimum sebesar 40 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 22,96 hal tersebut menunjukkan bahwa Transparansi terhadap Pengelolaan dana cukup memadai. Selanjutnya standar deviasi yang dimiliki sebesar 4,840 lebih kecil dari nilai rata-rata, hal tersebut menunjukkan variasi yang rendah atau perbedaan antara nilai minimum dan nilai maksimum.

Selanjutnya pada variabel Akuntabilitas (X_3) sebagai variabel independen memiliki nilai minimum sebesar 9 dan nilai maksimum sebesar 30 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 20,14 hal tersebut menunjukkan bahwa Akuntabilitas terhadap Pengelolaan dana cukup memadai. Selanjutnya standar deviasi yang dimiliki sebesar 4,167 lebih kecil dari nilai rata-rata, hal tersebut menunjukkan variasi yang rendah atau perbedaan antara nilai minimum dan nilai maksimum.

2. Uji Kaulitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner dapat menyatakan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Perhitungan validitas pada penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS dengan cara membandingkan nilai r_{hitung} (nilai product moment) dengan r_{tabel} . Untuk degree of freedom (df) = $n-2$, dalam hal ini jumlah sampel dilambangkan (n) dengan tingkat kepercayaan 10% atau nilai signifikansi $\alpha = 0,1$ dengan

ketentuan jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pertanyaan tersebut valid begitupun sebaliknya. Pada penelitian ini jumlah sampel sebanyak 99 orang dan besarnya df dapat dihitung $99 - 2 = 97$ dengan $\alpha = 0,1$ maka didapat r_{tabel} dari 97 adalah 0,1663. Berikut adalah hasil uji validitas penelitian:

Tabel IV. 13 Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Pengelolaan Dana (Y)	Y.1	0,475	0,1663	Valid
	Y.2	0,351	0,1663	Valid
	Y.3	0,681	0,1663	Valid
	Y.4	0,761	0,1663	Valid
	Y.5	0,540	0,1663	Valid
Partisipasi Masyarakat (X ₁)	X1.1	0,431	0,1663	Valid
	X1.2	0,262	0,1663	Valid
	X1.3	0,422	0,1663	Valid
	X1.4	0,523	0,1663	Valid
	X1.5	0,651	0,1663	Valid
	X1.6	0,586	0,1663	Valid
	X1.7	0,738	0,1663	Valid
	X1.8	0,601	0,1663	Valid
	X1.9	0,492	0,1663	Valid
	X1.10	0,401	0,1663	Valid
	X1.11	0,559	0,1663	Valid
	X1.12	0,636	0,1663	Valid
Transparansi (X ₂)	X2.1	0,387	0,1663	Valid
	X2.2	0,653	0,1663	Valid
	X2.3	0,707	0,1663	Valid

	X2.4	0,584	0,1663	Valid
	X2.5	0,622	0,1663	Valid
	X2.6	0,525	0,1663	Valid
	X2.7	0,623	0,1663	Valid
	X2.8	0,431	0,1663	Valid
Akuntabilitas (X ₃)	X3.1	0,546	0,1663	Valid
	X3.2	0,395	0,1663	Valid
	X3.3	0,567	0,1663	Valid
	X3.4	0,798	0,1663	Valid
	X3.5	0,826	0,1663	Valid
	X3.6	0,855	0,1663	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel IV. 13 diketahui bahwa hasil perhitungan uji validitas pada masing-masing item pernyataan memiliki r_{hitung} yang lebih besar dari r_{tabel} yaitu 0,1663 ($r_{hitung} > 0,1663$) yang mengartikan bahwa data pada variabel Pengelolaan Dana (Y), Partisipasi Masyarakat (X₁), Transparansi (X₂) dan Akuntabilitas (X₃) dinyatakan valid sehingga kuesioner tersebut dapat digunakan untuk melanjutkan ke analisis berikutnya.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi suatu alat ukur apakah dapat dipercaya jika pengukuran tersebut diulang. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* dengan nilai $> 0,70$ dan sebaliknya yang akan membuat hasil kesimpulan pada

variabel berbeda ketika dilakukan pengujian ulang dengan waktu yang berbeda. Berikut adalah hasil uji reliabilitas pada variabel penelitian:

Tabel IV. 14 Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronbach Alpha	Standar Nilai Cronbach Alpha	Keterangan
Pengelolaan Dana (Y)	0,771	>0,70	Reliable
Partisipasi Masyarakat (X ₁)	0,768	>0,70	Reliable
Transparansi (X ₂)	0,845	>0,70	Reliable
Akuntabilitas (X ₃)	0,740	>0,70	Reliable

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel IV. 14 diketahui bahwa hasil perhitungan uji reliabilitas menunjukkan semua variabel dalam penelitian memiliki nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,70. Sehingga semua variabel dari kuesioner penelitian dapat dikatakan reliabel karena mampu memperoleh data yang konsisten dan dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya yaitu uji hipotesis.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang mempunyai tujuan untuk menilai persebaran data dalam sebuah kelompok data atau variabel. Dari uji normalitas kita bisa melihat data tersebut berdistribusi dengan normal atau tidak normal.

Tabel IV. 15 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,85391646
Most Extreme Differences	Absolute	,079
	Positive	,079
	Negative	-,046
Test Statistic		,079
Asymp. Sig. (2-tailed)		,129 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data primer diolah, 2025

Dasar patokan dalam pengambilan keputusan dari uji normalitas dengan kolmogrov smirnov, yaitu:

- 1) Apabila nilai dari signifikansi (Sig.) $> 0,1$ maka data dalam penelitian berdistribusi normal.
- 2) Apabila nilai dari signifikansi (Sig.) $< 0,1$ maka data penelitian tidak berdistribusi normal.

Pada Tabel IV. 15 dapat diketahui jika nilai signifikansi Asymp.Sig (2-tailed) dari 99 responden adalah 0.129. Maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan dasar dalam pengambilan keputusan uji normalitas dengan kolmogrov smirnov bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat pada nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Suatu regresi dikatakan terjadi multikolonieritas apabila nilai tolerance $>0,1$ dan jika nilai VIF < 10 . Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diperoleh uji multikolinieritas sebagai berikut :

Tabel IV. 16 Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	13,831	2,496		5,542	,000		
Partisipasi Masyarakat (X ₁)	-,118	,052	-,220	2,268	,026	,890	1,124
Transparansi (X ₂)	,316	,068	,478	4,613	,000	,781	1,280
Akuntabilitas (X ₃)	-,075	,081	-,097	-,926	,357	,758	1,320

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana (Y)

Sumber: Data primer diolah, 2025

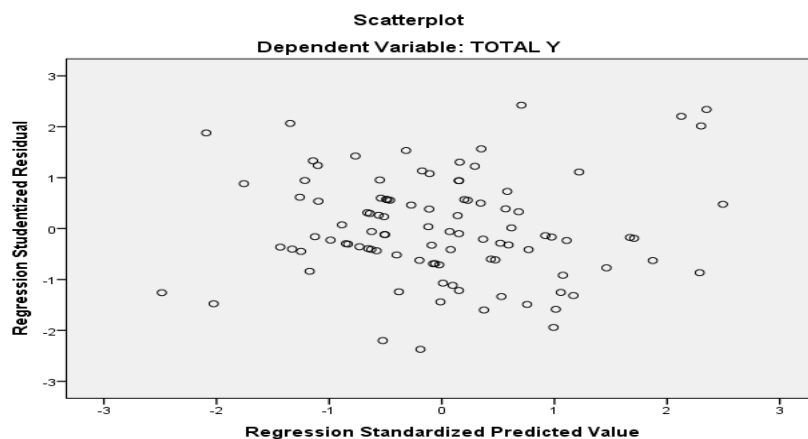
Tabel IV.16 dapat di interpretasikan bahwa pada bagian *tolerance* untuk variabel Partisipasi Masyarakat (X₁) sebesar 0.890, Transparansi (X₂) sebesar 0.781, dan Akuntabilitas (X₃) sebesar 0.758 jadi hasil tersebut > 0.10 . Sedangkan, nilai VIF untuk variabel Partisipasi Masyarakat (X₁) sebesar 1.124 Transparansi (X₂) sebesar 1.280 dan

Partisipasi Masyarakat (X_3) sebesar 1.320 jadi hasil tersebut <10 . Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam uji multikolinieritas tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat pada gambar scatterplot. Jika pada gambar scatterplot terdapat titik-titik data menyebar secara menyeluruh dan tidak membentuk pola bergelombang dan mengumpul hanya pada satu titik maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil dari uji heteroskedastisitas yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

Gambar IV. 17 Uji Heterokedastisitas Scatterplot



Sumber: Data primer diolah, 2025

Pada gambar IV. 17 scatterplot diatas terdapat titik-titik data menyebar. Walaupun ada sedikit yang saling menumpuk itu secara menyeluruh dan tidak membentuk pola bergelombang dan mengumpul

hanya pada satu titik maka tidak terjadi heteroskedastisitas, yang artinya data loyalitas konsumen terdistribusi dengan normal.

d. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi ini adalah analisis yang digunakan untuk mengukur variabel dependen (Pengelolaan Dana) apabila variabel independent dinaikkan atau diturunkan. Analisis regresi linier berganda ini mempunyai tujuan menguji pengaruh partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas sebagai variabel independen (terikat) dan pengelolaan dana sebagai variabel dependen (bebas).

Tabel IV. 18 Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	13,831	2,496		5,542	,000
Partisipasi Masyarakat (X ₁)	-,118	,052	-,220	2,268	,026
Transparansi (X ₂)	,316	,068	,478	4,613	,000
Akuntabilitas (X ₃)	-,075	,081	-,097	-,926	,357

a. Dependent Variable: TOTAL Pengelolaan Dana (Y)

Sumber: Data primer diolah, 2025

Pada tabel IV. 18 didapat hasil perhitungan diatas bahwa persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = 13,831 - 0,118X_1 + 0,316X_2 - 0,075X_3 +$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan bahwa:

1) Konstanta (α)

Nilai konstanta memiliki nilai yang positif sebesar 13,831. Tanda dari hasil positif menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dengan dependen. Sehingga dapat diartikan bahwa, ketika nilai variabel Partisipasi Masyarakat (X_1), Transparansi (X_2), dan Akuntabilitas (X_3) konstan atau sama dengan 0, maka nilai variabel dependen yaitu Pengelolaan Dana (Y) berubah menjadi nilai konstanta yaitu 13,831.

2) Partisipasi Masyarakat (X_1)

Nilai koefisien regresi untuk variabel Partisipasi Masyarakat (X_1) pada persamaan regresi diatas adalah -0,118 yang bertanda negatif. Sehingga dapat diartikan variabel partisipasi masyarakat (X_1) bernilai negatif artinya tidak terdapat hubungan antara partisipasi masyarakat dengan pengelolaan dana, yaitu menurut Mardiasmo bahwa semakin meningkat partisipasi masyarakat maka semakin meningkat pengelolaan dana sebaliknya semakin menurun partisipasi masyarakat maka semakin menurun pengelolaan dana kelurahan.

3) Transparansi (X_2)

Nilai koefisien regresi untuk variabel Transparansi (X_2) pada persamaan regresi diatas adalah 0,316. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh positif (searah) antara variabel. Sehingga dapat diartikan variabel transparansi (X_2) bernilai positif artinya terdapat hubungan positif antara transparansi dengan pengelolaan dana, yaitu menurut

Mardiasmo semakin meningkat transparansi maka semakin meningkat pengelolaan dana kelurahan.

4) Akuntabilitas (X_3)

Nilai koefisien regresi untuk variabel Partisipasi Masyarakat (X_3) pada persamaan regresi diatas adalah -0,75 yang bertanda negatif. Sehingga dapat diartikan variabel akuntabilitas (X_3) bernilai negative artinya tidak terdapat hubungan antara akuntabilitas dengan pengelolaan dana, yaitu menurut Mardiasmo bahwa semakin meningkat akuntabilitas maka semakin meningkat pengelolaan dana. Sebaliknya semakin menurun akuntabilitas maka semakin menurun pengelolaan dana kelurahan.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Pengujian dilakukan dengan taraf signifikansi 0,01. Jika $\text{Sig} > 0,01$ maka hipotesis yang diajukan ditolak. Sebaliknya Jika $\text{Sig} < 0,01$ maka hipotesis yang diajukan diterima.

Tabel IV. 19 Uji Parsial

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	13,831	2,496		5,542	,000
Partisipasi Masyarakat (X_1)	-,118	,052	-,220	2,268	,026
Transparansi (X_2)	,316	,068	,478	4,613	,000
Akuntabilitas (X_3)	-,075	,081	-,097	-,926	,357

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana (Y)

Dari tabel IV. 19 dalam dasar pengambilan keputusan hasil dari uji t yaitu dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabel. T tabel dapat diketahui dengan mencari derajat kebebasan ($df = n - k - 1$) = $99 - 3 - 1 = 95$. Sehingga didapat nilai t_{tabel} adalah 2,366. Taraf signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,01. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai t_{hitung} pada variabel partisipasi masyarakat (X_1) sebesar -2,268. Nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-2,268 < 2,366$, dan nilai signifikansi $0,026 > 0,01$. Maka H_1 ditolak, hal ini menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat (X_1) tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen atau pengelolaan dana.
- 2) Nilai t hitung pada variabel Transparansi (X_2) sebesar 4,613. Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,613 > 2,366$, dan nilai signifikansi $0,000 < 0,01$. Maka H_2 diterima, hal ini menunjukkan bahwa variabel transparansi (X_2) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen atau pengelolaan dana.
- 3) Nilai t hitung pada variabel akuntabilitas (X_3) sebesar -0,926. Nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-2,268 < 2,366$, dan nilai signifikansi $0,357 > 0,01$. Maka H_3 ditolak, hal ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas (X_3) tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen atau pengelolaan dana.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh simultan dari semua variabel independet (X) terhadap variabel dependen (Y). Pengujian dilakukan dengan taraf signifikansi 0,1. Jika $\text{Sig.} > 0,1$ maka hipotesis yang diajukan ditolak. Sebaliknya Jika $\text{Sig.} < 0,1$ maka hipotesis yang diajukan diterima.

Tabel IV. 20 Uji Simultan

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	204,311	3	68,104	8,106	,000 ^b
Residual	798,194	95	8,402		
Total	1002,505	98			

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana(Y)

b. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat (X_1), Transparansi (X_2), Akuntabilitas (X_3)

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji simultan yang telah dilakukan antara variabel partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana kelurahan diketahui bahwa nilai Sig. adalah sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari derajat kesalahan ($\alpha=0,1$) ($0,00 < 0,1$). Sehingga H_4 diterima, dengan kata lain, variabel partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan.

c. Uji Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel independen.

Tabel IV. 21 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,451 ^a	,204	,179	2,899

a. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat (X_1), Transparansi (X_2), Akuntabilitas (X_3)

b. Dependent Variable: Pengelolaan Dana (Y)

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji koefisien deteminasi di atas, diketahui bahwa pengelolaan dana kelurahan mampu dijelaskan oleh partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas sebesar 20,4%. Sisanya 79,6% dari pengelolaan dana kelurahan dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

Coefficient determination (R-Square) digunakan untuk mengukur seberapa banyak variabel endogen dipengaruhi oleh variabel lainnya. Chin dalam Ghozali, menyebutkan hasil R2 sebesar 0,67 ke atas untuk variabel dependen dalam model struktural mengindikasikan pengaruh variabel independen (yang mempengaruhi) terhadap variabel depedenen (yang dipengaruhi) termasuk dalam kategori baik. Sedangkan jika hasilnya sebesar 0,33 – 0,67 maka termasuk dalam kategori sedang, dan jika

hasilnya sebesar 0,19 – 0,33 maka termasuk dalam kategori lemah.

Dengan demikian maka model penelitian ini dapat dikategorikan lemah.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis seberapa jauh pengaruh variabel independen yaitu Partisipasi Masyarakat, Transparansi dan Akuntabilitas terhadap variabel dependen yaitu Pengelolaan Dana.

1. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan

Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian ini menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa, karena pada uji parsial diketahui nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} yaitu-- $2,268 < 2,366$, artinya semakin menurun partisipasi masyarakat maka semakin menurun pengelolaan dana kelurahan.

Penelitian sejalan dengan teori yang dijelaskan oleh Mardiasmo jika masyarakat terlibat dalam proses perencanaan dan pengawasan, maka pengelolaan dana akan meningkat. Sebaliknya, ketika masyarakat dikelurahan tidak aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan (muskel) maka pengelolaan dana akan menurun.

Hal ini sesuai dengan temuan penelitian oleh Endar Ayu Yusnida pada tahun 2024⁶² dan Muhammad Rifqi Ma'mun pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Namun menurut penelitian Elisa Rama Yanti pada

⁶² Yusnida and Pangestika, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Se- Kecamatan Bumijawa."

tahun 2023⁶³ yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan di atas.

2. Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan

Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian ini menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana kelurahan, karena pada uji parsial diketahui nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu $4,613 > 2,366$, artinya semakin meningkat transparansi maka semakin meningkat pengelolaan dana.

Menurut teori agensi berpendapat bahwa aparat kelurahan adalah pelayan. Dimana pemerintah kelurahan menyediakan informasi mengenai pemerintahan kelurahan, khususnya pengelolaan keuangan kelurahan, kepada masyarakat luas dan memberikan akses yang luas terhadap informasi tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya asimetri informasi yang dapat menimbulkan keraguan terhadap legitimasi pemerintahan di mata masyarakat. Pengurus akan selalu berupaya menerapkan konsep transparansi yang tinggi agar dapat memberikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat. Hal ini akan memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengawasan guna mencegah terjadinya inkonsistensi dalam pengelolaan uang kelurahan.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nor Hasanah pada tahun 2022 dan Rahma Yulita pada tahun 2023⁶⁴ yang berpendapat bahwa

⁶³ Yanti, Wiralestari, and Tiswiyanti, "Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh)."

transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, ada pengaruh baik keterbukaan terhadap pengelolaan uang bagi masyarakat. Di sisi lain, hal ini bertentangan dengan temuan penelitian Elisa Rama Yanti pada tahun 2023⁶⁵ yang menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

3. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan

Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian ini menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa, karena pada uji parsial diketahui nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} yaitu $-2,268 < 2,366$, artinya semakin menurun akuntabilitas maka semakin menurun pengelolaan dana kelurahan.

Penelitian ini sejalan dengan teori yang dijelaskan oleh Mardiasmo bahwa pengelolaan adalah salah satu bentuk kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, penurunan akuntabilitas akan secara langsung menyebabkan menurunnya kualitas pengelolaan dana yang dilakukan oleh pihak yang diberi amanat.

Hal ini sesuai dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rifqi Ma'mun pada tahun 2023⁶⁶ dan Nor Hasanah pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana

⁶⁴ Yulita, Apriani, and Dewi Fitrianiingsih, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan Di Kecamatan Palu Timur."

⁶⁵ Yanti, Wiralestari, and Tiswiyanti, "Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh)."

⁶⁶ Rifqi Ma, "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Kecamatan Brebes) Skripsi Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana S1."

desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan sebelumnya. Namun menurut penelitian yang dilakukan oleh Zulfan Saputra pada tahun 2023⁶⁷ dan Rahma Yulita pada tahun 2023 yang berpendapat bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

⁶⁷ Zulfan Saputra, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Lieue Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu tentang pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan Panyanggar Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana kelurahan. Menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat tidak serta merta membawa perbaikan dalam pengelolaan keuangan kelurahan. Hal ini terjadi karena keterlibatan masyarakat dalam penggunaan dan penatausahaan uang kelurahan masih sangat minim.
2. Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana. Menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan menyediakan informasi mengenai pemerintahan kelurahan, khususnya pengelolaan keuangan kelurahan, kepada masyarakat luas dan memberikan akses yang luas terhadap informasi tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya asimetri informasi yang dapat menimbulkan keraguan terhadap legitimasi pemerintahan di mata masyarakat.
3. Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana. Menunjukkan bahwa adanya akuntabilitas tidak serta merta menghasilkan pengelolaan dana kelurahan yang lebih baik. Hal ini terjadi karena aparat kelurahan belum akuntabel dan tidak melaporkan pelaksanaan pengelolaan dana kelurahan kepada masyarakat dan pemerintah secara sistematis.

4. Partisipasi Masyarakat, Transparansi dan Akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan dana. Menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan transparansi dapat membantu mengawasi dan mengontrol penggunaan dana, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan dana. Akuntabilitas memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara bertanggung jawab.

B. Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan sangat kurang dalam menerapkan partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kelurahan. Karena ketiga unsur tersebut sangat penting untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan membuat kelurahan Panyanggar yang ada di Kecamatan Padangsidempuan Utara memiliki tata kelola administrasi yang baik pula.

- 1) Perlu meningkatkan partisipasi masyarakat guna tercapainya pengelolaan dana kelurahan yang baik. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pemerintahan, melibatkan masyarakat dalam proses pemerintahan, adanya pengawasan dari masyarakat, dan keterlibatan masyarakat dalam penerimaan manfaat program pemerintahan.
- 2) Perlu meningkatkan transparansi guna tercapainya pengelolaan dana kelurahan yang baik. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan transparansi adalah dengan memberikan informasi secara terbuka, jujur dan menyeluruh kepada masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan yang

menggunakan dana kelurahan, memberikan akses yang mudah mengenai dokumen terkait dana kelurahan, dan diikutsertakannya masyarakat dalam musyawarah rencana pengelolaan dana kelurahan.

- 3) Perlu meningkatkan akuntabilitas guna tercapainya pengelolaan dana kelurahan yang baik. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas adalah dengan menyajikan informasi penyelenggaraan secara terbuka, cepat, tepat, kepada pihak yang membutuhkan, keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana kelurahan, mampu menyusun pengelolaan keuangan dengan berorientasi kepada kepentingan publik, dan dapat memberikan pertanggungjawaban secara rasional.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dengan pembahasan, kesimpulan, dan terdapat keterbatasan penelitian di atas, maka saran dari peneliti kepada peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Kelurahan Panyanggar Kecamatan Padangsidimpun Utara Kota Padangsidimpun diharapkan terus mempertahankan kedisiplinan dan kinerjanya yang baik dengan terus mempertanggung jawabkan pengelolaan dana kelurahan secara relevan dan lengkap, menyampaikan kepada publik mengenai informasi dengan jujur dan terbuka, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam pertanggung jawaban, pelaksanaan, perencanaan, dan pengambilan keputusan di setiap akhir periodenya. Para aparatur kelurahan juga diharapkan bisa memanfaatkan akuntansi dengan basis syariah dengan berbagai prinsip seperti partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengangkat variabel lain selain yang peneliti saat ini gunakan seperti pengawasan dana kelurahan dan kepercayaan kepada pemerintah kelurahan dikarenakan pengelolaan dana kelurahan terutama di desa Kelurahan Panyanggar Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan memiliki banyak faktor lain yang mempengaruhinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Albert, K. (n.d.). *Belajar Mudah SPSS untuk pemula*. (2009).
- Ali, M. M., Hariyati, T., Pratiwi, M. Y., & Afifah, S. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Penerapannya dalam Penelitian. *Education Journal*.2022, 2(2), 1–6.
- Amulia, R. A. (2021). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Desa*. 15, 1–11.
- Andres, S. P. (2022). *Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Asep Mulyana, Endang Susilawati, Yuniati Fransisca, Marrilyn Arismawati, Fachrul Madrapriya, Debora Tri Oktarina Phety, Afif Hendri Putranto, Euis Fajriyah, Reza Kurniawan, Yoana Nurul Asri, Lisa Astria Milasari, I. S. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Aziz, H. A. (n.d.). *Menyusun Instrumen Penelitian & Uji Validitas-Reliabilitas*.
- Dr. Tiomy Butsianto Adi, Muh. Irfandy Azis, P. . (2025). *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Fahrezi, A. (2022). Pengaruh Akuntabilitas dan transparansi Laporan keuangan terhadap tingkat Kepercayaan Donatur pada Mesjid jamik Medan Tenggara VII. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 39–46.
- Firanti, N., & Biduri, S. (2024). Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Indonesia Tidak Lengkap Tanpa Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Dan Masyarakat*, 1(3), 17.
- Firdaus. (n.d.). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*.
- Flambonita, S., Ridwan, R., Ahmaturrahman, A., & Apriyani, L. (2022). Pengelolaan Dan Informasi Perencanaan Anggaran Desa. *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*, 5(4), 378–394.
- Girsang, P., & Auwalin, I. (2023). Evaluasi Dampak Dana Kelurahan Terhadap Tingkat Kemiskinan Perkotaan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 1147–1161.
- Harnovinsah. (2023). *Teori Akuntansi*.
- Husnawijaya, R., & Zarkasi, A. (2023). Tinjauan komperatif pembentukan pemekaran kecamatan antara peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 3(1), 100–110.
- Kementerian Dalam Negeri. (2019). *Surat Edaran Nomor 146/2694/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun*

2018 Tentang Kegiatan Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

M, A. B. M. (2020). Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4(2), 233–249.

Majid, J., Serlianti, S., Mahdalena, M., & Muchlis, M. (2022). Partisipasi Masyarakat Sebagai Wujud Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, 2(1), 33–46.

Mariana. (n.d.). *Informasi Akuntansi dan Keputusan Kredit*.

Muhamad Uyun, B. L. Y. (2022). *Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif*.

Nababan, J. H., & Shahrullah, R. S. (2022). Peranan Otonomi Daerah Terhadap Pembangunan Ekonomi Melalui Pengelolaan Keuangan Daerah. *Journal of Law and Policy Transformation*, 6(2), 108.

Nasution, R. H., Syafina, L., Jl, A., Iskandar, W., Estate, M., Percut, K., Tuan, S., Serdang, K. D., & Utara, S. (2024). *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Kelurahan (Studi Kasus Kantor Lurah Karang Berombak , Kecamatan Medan Barat , Kota Medan) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara , Indonesia masyarakat yang tinggal di sana dan keadaan daerah tersebut . Tuju. 4.*

Nugraheni, A. S. (2019). *Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi Berbasis Pembelajaran Aktif*.

Prasetya, I. (2022). *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori dan Praktik*.

QAK, M., & HOLIFAH, N. (2024). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan Di Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya. *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 4(1), 49–59.

Rahayu, A. S. (2017). *Pengantar Pemerintahan Daerah*.

Rahima Br Purba, Haryono Umar, Oktafiani Khamilah Siregar, E. (2022). *Model Pengawasan Intern Keuangan Desa: Upaya Pencegahan Tindak Korupsi*.

Rifqi Ma, M. (2023). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Kecamatan Brebes) Skripsi Untuk memenuhi sebagian persyaratan Mencapai derajat Sarjana S1.*

Sabri, D., Adam, M., Utami, S., & Harmen, H. (2024). *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam konteks perencanaan pembangunan*.

Saputra, Z. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Lieue Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. *Pembangunan*.

- Saren, C. M., Tinangon, J. J., Warongan, J. D. L., Studi, P., Akuntansi, M., Ekonomi, F., Bisnis, D., Ratulangi, S., & Kampus, J. (2022). Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan di Kecamatan Aertembaga Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"*, 13(1), 101–112.
- Siyoto, S. (n.d.). *Dasar Metodologi Penelitian*.
- Sopiati, G. D. dan. (2024). Pengumpulan Data Penelitian. *Jurnal Cendikia Ilmiah*, 3, No.5, 5430.
- Swarjana, I. K. (2022). *Populasi Sampel, Teknik Sampling & Bias dalam Penelitian*.
- Yamin, S. (2021). *TUTORIAL STATISTIK SPSS, LISREL, WARPPLS, & JASP (MUDAH & APLIKATIF)*.
- Yanti, E. R., Wiralestari, & Tiswiyanti, W. (2023). Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh). *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 12(01), 53–64.
- Yulita, R., Apriani, N., & Dewi Fitrianiingsih, S. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan di Kecamatan Palu Timur. *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 6(No. 12), 1975–1982.
- Yusnida, E. A., & Pangestika, M. A. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Se-Kecamatan Bumijawa. *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi Volume*, 8(1), 25–40.
- Yusuf, F. (2024). Efektivitas Penggunaan Anggaran di Kelurahan Cikoro Kabupaten Gowa. *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Zaki, A. N., Oktafiyani, M., & Yovita, L. (2023). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 2(1), 23–37.
- Zulhelmy, M. H. (2023). *Pokok-Pokok Pikiran Akuntabilitas Islam*.

SURAT VALIDASI ANGKET

Menerangkan bahwa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indah Sari, M.A

NIDN : 2025049403

Telah memberikan pengamatan dan masukan terhadap angket untuk kelengkapan penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan.”**

Yang disusun oleh:

Nama : Sona Indah Yuspra

Nim : 2140600012

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Prodi : Akuntansi Syariah

Adapun masukan saya adalah sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.

Dengan harapan masukan dan penilaian yang saya berikan dapat dipergunakan untuk menyempurnakan dan memperoleh kualitas angket yang baik.

Padangsidimpuan, Juni 2025

Validator

Indah Sari, M.A
NIDN : 2025049403

LEMBAR VALIDASI

Pengelolaan Dana Kelurahan

Petunjuk :

1. Kami mohon kiranya Saudara/Saudari memberikan penilaian ditinjau dari aspek soal-soal yang kami susun.
2. Beri tanda *checklist* (✓) pada kolom V (Valid), VR (Valid Revisi), dan TV (Tidak Valid) pada tiap butir soal.
3. Untuk revisi Saudara/Saudari dapat langsung menuliskannya pada naskah yang perlu direvisi atau menuliskannya pada kolom saran yang kami lampirkan.
4. Lembar soal terlampir.

Indikator	No. Soal	V	VR	TV
Pengalokasian sumber daya.	1,2,3			
Operasional kegiatan mendukung efisiensi dan efektifitas.	4,5,6			

Catatan:

.....
.....
.....

Padangsidempuan, Juni 2025

Validator

Indah Sari, M.A
NIDN : 2025049403

LEMBAR VALIDASI

Partisipasi Masyarakat

Petunjuk :

1. Kami mohon kiranya Saudara/Saudari memberikan penilaian ditinjau dari aspek soal-soal yang kami susun.
2. Beri tanda *checklist* (✓) pada kolom V (Valid), VR (Valid Revisi), dan TV (Tidak Valid) pada tiap butir soal.
3. Untuk revisi Saudara/Saudari dapat langsung menuliskannya pada naskah yang perlu direvisi atau menuliskannya pada kolom saran yang kami lampirkan.
4. Lembar soal terlampir

Indikator	No. Soal	V	VR	TV
Keterlibatan dalam pengambilan keputusan program-program kelurahan.	1,2			
Mengusulkan rencana anggaran.	3,4			
Terlibat dalam rapat paripurna.	5,6			
Terlibat mengawasi dan melaporkan.	7,8			
Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran.	9,10			
Memberikan penghargaan	11,12			

Catatan :

.....
.....

Padangsidimpun, Juni 2025

Validator

Indah Sari, M.A
NIDN : 2025049403

LEMBAR VALIDASI

Transparansi

Petunjuk :

1. Kami mohon kiranya Saudara/Saudari memberikan penilaian ditinjau dari aspek soal-soal yang kami susun.
2. Beri tanda *checklist* (✓) pada kolom V (Valid), VR (Valid Revisi), dan TV (Tidak Valid) pada tiap butir soal.
3. Untuk revisi Saudara/Saudari dapat langsung menuliskannya pada naskah yang perlu direvisi atau menuliskannya pada kolom saran yang kami lampirkan.
4. Lembar soal terlampir.

Indikator	No. Soal	V	VR	TV
Ketersediaan sistem informasi	1,2			
Aksesibilitas terhadap alokasi dana kelurahan	3,4			
Publikasi laporan keuangan	5,6			
Ketersediaan informasi kinerja.	7,8			

Catatan :

.....
.....

Padangsidempuan, Juni 2025

Validator

Indah Sari, M.A
NIDN : 2025049403

LEMBAR VALIDASI

Akuntabilitas

Petunjuk :

1. Kami mohon kiranya Saudara/Saudari memberikan penilaian ditinjau dari aspek soal-soal yang kami susun.
2. Beri tanda *checklist* (✓) pada kolom V (Valid), VR (Valid Revisi), dan TV (Tidak Valid) pada tiap butir soal.
3. Untuk revisi Saudara/Saudari dapat langsung menuliskannya pada naskah yang perlu direvisi atau menuliskannya pada kolom saran yang kami lampirkan.
4. Lembar soal terlampir.

Indikator	No. Soal	V	VR	TV
Laporan keuangan kelurahan sebagai alat pertanggung jawaban.	1,2			
Pendapatan dan pengeluaran kelurahan dicatat pada laporan keuangan.	3,4			
Laporan keuangan kelurahan disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	5,6			

Catatan:

.....
.....

Padangsidimpuan, Juni 2025

Validator

Indah Sari, M.A
NIDN : 2025049403

ANGKET PENELITIAN
PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN DANA KELURAHAN

I. IDENTITAS RESPONDEN

Saya mohon kesediaan saudara/saudari untuk menjawab pernyataan-pernyataan berikut ini dengan mengisi identitas diri.

Nama :
Usia :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Pekerjaan : ☐ Siswa SMA
☐ Mahasiswa/i
☐ Masyarakat
☐ Apartur Kelurahan

II. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Jawablah pernyataan berikut dengan memberi tanda Chek List (✓) atau silang (x) pada kolom yang sudah disediakan. Setiap butir pernyataan berikut terdiri dari 5 pilihan jawaban. Adapun makna dari jawaban tersebut adalah:

No.	Tanggapan Responden	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral (N)	3

4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

III. DAFTAR PERNYATAAN

A. Pernyataan Pengelolaan Dana

	PERNYATAAN	ALTERNATIF JAWABAN				
		(STS)	(TS)	(N)	(S)	(SS)
1	Pengalokasian sumber daya yang tidak mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dapat menyebabkan kegagalan program dan kegiatan pembangunan					
2	Pengalokasian sumber daya yang baik dapat membantu mengoptimalkan hasil yang dicapai dalam pembangunan kelurahan.					
3	Pengalokasian sumber daya yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kelurahan.					
4	Pemerintah kelurahan telah mampu melaksanakan pengelolaan keuangan kelurahan secara ekonomis, efisien dan efektif juga adil merata					
5	Pengelolaan keuangan kelurahan dilakukan secara terbuka, jujur, akuntabel, ekonomis, efisien dan efektif dan dapat dipertanggung jawabkan.					

6	Operasional kegiatan yang tidak didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dapat menyebabkan kesalahan dan inefisiensi.					
---	--	--	--	--	--	--

B. Pernyataan Partisipasi Masyarakat

NO.	PERNYATAAN	ALTERNATIF JAWABAN				
		(STS)	(TS)	(N)	(S)	(SS)
1.	Pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan.					
2	Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan program-program kelurahan dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat.					
3	Masyarakat memiliki hak untuk mengusulkan rencana anggaran setiap pembangunan maupun dana yang berasal dari kelurahan.					
4	Mengusulkan rencana anggaran yang tidak realistis dapat menyebabkan kekecewaan dan ketidakpuasan masyarakat.					
5	Masyarakat aktif pada saat pelaksanaan rapat-rapat proses pengambilan keputusan.					

6	Terlibat dalam rapat dapat membantu meningkatkan partisipasi dan kontribusi dari semua anggota tim atau <i>stakeholder</i>					
7	Melibatkan masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan setiap anggaran.					
8	Terlibat dalam mengawasi dan melaporkan pengelolaan dana dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana.					
9	Masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses penilaian dan memberikan pendapat tentang bagaimana dana seharusnya dikelola.					
10	Masyarakat dapat memantau dan memberikan penilaian tentang penggunaan dana, apakah sesuai dengan tujuan dan kebutuhan.					
11	Memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dengan baik.					
12	Memberikan penghargaan kepada pengelola dana dapat meningkatkan kinerja dalam mengelola dana					

C. Pernyataan Transparansi

NO.	PERNYATAAN	ALTERNATIF JAWABAN				
		(STS)	(TS)	(N)	(S)	(SS)
1	Ketersediaan sistem informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk pengawasan penggunaan dana kelurahan.					
2	Sistem informasi tentang keuangan dana kelurahan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat maupun pihak pengguna informasi lainnya baik melalui media elektronik maupun media informasi lainnya.					
3	Masyarakat mempunyai akses untuk memperoleh informasi tentang alokasi dana kelurahan dengan mudah.					
4	Saya merasa alokasi dana kelurahan dapat mengakomodasi dan meningkatkan usulan/suara rakyat.					
5	Tersedia akses yang mudah untuk memperoleh dokumen publik tentang laporan keuangan.					
6	Publikasi laporan keuangan harus disajikan dalam format yang sederhana dan mudah dipahami.					
7	Pemerintah kelurahan sepenuhnya menyadari akan kewajibannya untuk					

	memberikan informasi kinerja keuangan yang terbuka menyeluru dan jujur kepada masyarakat.					
8	Informasi kinerja pengelolaan dana mencakup semua aspek penting dari pengelolaan dana, seperti penggunaan dana dan hasil yang dicapai.					

D. Pernyataan Akuntabilitas

NO.	PERNYATAAN	ALTERNATIF JAWABAN				
		(STS)	(TS)	(N)	(S)	(SS)
1	Masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi kinerja keuangan kelurahan dengan laporan keuangan pengelolaan dana yang baik.					
2	Laporan keuangan pengelolaan dana kelurahan dapat mudah di akses dan dapat disajikan secara rinci, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara cepat dan tepat.					
3	Pendapatan dan pengeluaran yang akurat dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan laporan keuangan pengelolaa dana.					
4	Pendapatan dan pengeluaran kelurahan diaudit secara teratur untuk memastikan keakuratan dan					

	transparansi.					
5	Laporan keuangan pengelolaan dana kelurahan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.					
6	Laporan keuangan pengelolaan dana disajikan secara tepat waktu dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.					

Responden

()

Lampiran 2. Jawaban Responden

Variabel Pengelolaan Dana (Y)

NO	NAMA	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	TOTAL Y
1	ELYSTINA SARI HASIBUAN	4	4	5	3	2	4	22
2	EFRILIA	4	4	4	3	3	4	22
3	RIZKY YAHYA PULUNGAN	4	5	4	2	1	5	21
4	TUA	5	5	4	1	2	4	21
5	MASNIARI	5	5	5	3	1	4	23
6	PIJORKOLING	5	4	4	3	3	4	23
7	WINDI RENA SIREGAR	5	4	4	2	2	4	21
8	ATIKA HARAHAAP	4	4	5	1	2	5	21
9	ARDIANSYAH HARAHAAP	4	5	3	2	2	5	21
10	FANDY RITONGA	5	5	4	2	2	4	22
11	NISA HARAHAAP	4	5	4	1	2	5	21
12	RINI	4	5	5	3	3	4	24
13	NUR AINUN LUBIS	5	5	4	3	3	4	24
14	EMMY KHOLILAH	5	4	4	2	2	4	21
15	AMINAH F RITONGA	5	5	4	2	2	4	22
16	SERI AYUMI SIREGAR	1	5	5	1	2	4	18
17	RUKIYAH TAMPUBOLON	4	4	4	2	2	4	20
18	NAMBA	5	5	4	2	2	4	22
19	HAIRUL AMIN HARAHAAP	2	5	5	4	5	4	25
20	ELITA	4	4	4	2	2	4	20
21	DODY ANUGERAH SIREGAR	4	5	4	2	2	3	20
22	AYU LESTARI LUBIS	4	5	4	2	2	4	21
23	KEMAL	4	5	4	3	3	4	23

24	GANI	4	4	5	1	1	1	16
25	AGUS	4	5	4	2	2	4	21
26	RISPAN	5	4	4	2	2	4	21
27	RIA HARAHAHAP	5	5	2	2	2	4	20
28	YUSUF	4	5	4	2	2	4	21
29	ANDIKA	5	4	4	2	3	4	22
30	MULIA YUSUF	4	4	5	3	2	4	22
31	YULIANA SIREGAR	4	5	5	2	2	4	22
32	ANDINI SIREGAR	4	4	5	2	1	4	20
33	MITA FITRIANSYAH SIREGAR	4	4	5	2	2	4	21
34	RAHMADANI SIREGAR	4	5	5	2	2	4	22
35	NUR AISAH	5	4	4	2	2	4	21
36	RAJA OLOAN SIREGAR	5	4	4	2	1	4	20
37	WIRNA SARI SIREGAR	4	4	5	5	5	5	28
38	AULIA MELANI	4	5	5	4	4	4	26
39	IBADUL RAHMAN	3	3	4	2	2	2	16
40	AHMAD RAFLI	4	4	4	2	2	2	18
41	FEBRIANA PASARIBU	4	4	4	2	2	2	18
42	IDA AGUSTINA LUBIS	4	4	4	2	2	2	18
43	RONI ANUGRAH	4	4	4	5	5	5	27
44	MAHDI RIZKY	4	4	5	1	2	3	19
45	ALI MUDA	4	4	4	3	3	3	21
46	RITA SURYANI	4	4	4	2	2	2	18
47	DAMAN HURI PULUNGAN	5	5	5	3	3	3	24
48	INKA JUWITA	5	5	4	4	3	3	24
49	AZIZAH LUMBANTOBING	4	4	4	5	5	5	27
50	UMROH	4	4	4	5	2	2	21

51	NUR HABIBAH	4	4	4	4	2	2	20
52	NURCAHYA	4	4	3	3	2	2	18
53	MASITOH NASUTION	5	5	5	2	3	3	23
54	JAMILA SIMAMORA	4	4	4	2	2	2	18
55	DORIANI	4	4	4	3	3	3	21
56	YULIA ARDANI	2	4	5	4	4	2	21
57	WAHYUDI	4	4	4	1	2	4	19
58	SAHARA HARAHAHAP	4	4	4	2	2	2	18
59	MASDEWI SIMANJUNTAK	3	4	4	4	3	3	21
60	MAISON ALAMSYAH SIREGAR	5	5	5	2	2	2	21
61	FAHRI SYAH MUZZAKI	5	5	5	1	1	1	18
62	RIZKI MAULIDA	4	5	4	5	3	3	24
63	EFENDI	5	4	4	2	1	1	17
64	MARDIAH NASUTION	5	5	5	2	2	2	21
65	MELI HARAHAHAP	3	4	5	3	3	2	20
66	FITRI BATUBARA	5	5	5	1	1	1	18
67	WAHYU ANANDA SIREGAR	5	5	5	1	1	1	18
68	KHOIRUDDIN	5	5	5	5	5	5	30
69	NOSUDERA RAMBE	5	5	5	2	2	2	21
70	ANNISA ZULFAH	4	4	4	2	2	3	19
71	WIWING DEVIKA	5	5	5	1	1	3	20
72	HELMALIA PUTRI NASUTION	4	4	4	2	2	3	19
73	DINDA ARIYANI	4	4	4	2	2	3	19
74	NITA	5	5	5	1	1	1	18
75	DAMRI	4	4	4	2	2	2	18
76	AQILA	5	5	5	1	1	1	18
77	ARPEN	5	5	5	1	1	4	21

78	SAIMA PUTRI	5	5	5	1	1	4	21
79	FADHILA RIZKI	5	5	5	2	2	2	21
80	FADILLAH	4	4	4	1	1	1	15
81	WARDAH TUL JANNAH	5	5	5	1	1	3	20
82	MUHAMMAD JEFRI	4	4	4	2	2	3	19
83	NANDIRA	5	5	5	1	1	3	20
84	KAINA	5	5	5	1	1	4	21
85	SORAYA HUMAIRA	4	4	4	2	2	5	21
86	SASKIA	4	4	4	2	2	4	20
87	QORIAH AULIA	5	5	5	1	1	5	22
88	NUHA ZAHIRA SIMANJUNTAK	1	5	5	1	1	1	14
89	ELSA ARINI	4	4	4	2	2	2	18
90	ILHAM RIZKY	4	4	4	2	2	2	18
91	FADIL	5	5	5	1	1	1	18
92	AMMAR	4	4	4	2	2	2	18
93	RODIYAH	5	5	5	1	1	1	18
94	ULFA YANTI	4	4	4	2	2	2	18
95	NURJANNAH WITA	5	5	5	1	1	1	18
96	PRETTY OCTAWIFANY	5	5	5	2	2	2	21
97	UMMI PASARIBU	4	4	4	2	2	2	18
98	TIONIDA	4	4	4	2	2	2	18
99	NURIDA AMNAWITA	4	4	4	2	2	2	18

Variabel Partisipasi Masyarakat (X1)

NAMA	X 1. 1	X 1. 2	X 1. 3	X 1. 4	X 1. 5	X 1. 6	X 1. 7	X 1. 8	X 1. 9	X 1. 10	X 1. 11	X 1. 12	TO TA L X1
ELYSTINA SARI HASIBUAN	4	4	4	5	3	4	3	4	4	4	3	3	45
EFRILIA	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	5	5	48
RIZKY YAHYA PULUNGAN	3	5	5	4	3	4	2	3	5	4	3	3	44
TUA	3	5	5	4	4	4	1	3	4	5	3	3	44
MASNIARI	4	4	5	4	4	4	3	3	5	3	4	2	45
PIJORKOLING	2	5	4	4	3	4	5	2	4	5	3	3	44
WINDI RENA SIREGAR	2	5	4	4	2	2	2	3	4	5	4	2	39
ATIKA HARAHAP	1	4	5	4	1	2	2	3	4	4	3	1	34
ARDIANSYAH HARAHAP	5	4	4	5	4	3	2	4	4	5	3	4	47
FANDY RITONGA	4	4	5	5	4	3	2	4	5	5	3	3	47
NISA HARAHAP	1	5	5	5	3	4	2	5	4	5	4	4	47
RINI	3	5	4	3	5	4	1	4	5	5	4	3	46
NUR AINUN LUBIS	3	4	4	3	4	4	1	4	4	4	4	3	42
EMMY KHOLILAH	2	4	4	4	3	3	1	4	4	5	4	4	42
AMINAH F RITONGA	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4	4	2	43
SERI AYUMI SIREGAR	2	5	4	5	2	3	1	3	4	4	3	3	39
RUKIYAH TAMPUBOLON	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	45
NAMBA	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4	4	2	43
HAIRUL AMIN HARAHAP	4	3	3	5	3	4	4	4	3	4	5	5	47
ELITA	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	45

DODY ANUGERAH SIREGAR	4	4	5	4	4	4	2	4	4	4	3	3	45
AYU LESTARI LUBIS	4	4	4	4	4	3	2	3	4	4	3	3	42
KEMAL	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	45
GANI	3	4	4	2	1	4	1	2	3	4	3	3	34
AGUS	4	4	4	4	4	3	2	3	4	4	3	3	42
RISPAN	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	46
RIA HARAHAHAP	4	4	5	4	4	4	2	4	4	4	2	2	43
YUSUF	4	4	5	4	4	4	2	3	4	4	4	4	46
ANDIKA	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	43
MULIA YUSUF	2	4	4	5	1	4	2	5	4	4	4	4	43
YULIANA SIREGAR	2	5	4	4	2	1	1	1	1	3	3	3	30
ANDINI SIREGAR	5	5	4	4	2	4	1	4	4	4	3	3	43
MITA FITRIANSYAH SIREGAR	2	4	4	4	2	4	2	4	4	4	3	3	40
RAHMADANI SIREGAR	1	5	4	4	2	4	4	4	4	5	3	3	43
NUR AISAH	1	4	4	5	3	3	2	4	3	4	4	4	41
RAJA OLOAN SIREGAR	1	4	5	5	2	4	1	2	4	5	4	2	39
WIRNA SARI SIREGAR	3	4	4	4	3	3	3	3	3	5	5	5	45
AULIA MELANI	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	55
IBADUL RAHMAN	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	48
AHMAD RAFLI	3	4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	53
FEBRIANA PASARIBU	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	54
IDA AGUSTINA LUBIS	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	53
RONI ANUGRAH	4	4	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	47

[illegible]

WAHYU ANANDA SIREGAR	1	5	5	5	3	3	5	5	5	5	5	5	52
KHOIRUDDIN	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
NOSUDERA RAMBE	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	59
ANNISA ZULFAH	4	4	4	5	5	5	2	3	3	3	4	4	46
WIWING DEVIKA	5	5	5	4	4	4	1	3	3	3	5	5	47
HELMALIA PUTRI NASUTION	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	54
DINDA ARIYANI	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	55
NITA	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	52
DAMRI	3	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	52
AQILA	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	53
ARPEN	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	55
SAIMA PUTRI	4	4	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	55
FADHILA RIZKI	3	3	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	52
FADILLAH	4	4	4	3	3	3	5	5	4	3	4	5	47
WARDAH TUL JANNAH	3	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	56
MUHAMMAD JEFRI	3	3	4	4	5	5	5	3	4	4	5	5	50
NANDIRA	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3	4	4	43
KAINA	1	4	4	4	5	5	1	5	3	3	4	4	43
SORAYA HUMAIRA	2	5	5	5	4	4	2	4	3	3	5	5	47
SASKIA	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	46
QORIAH AULIA	3	5	5	5	5	5	3	4	4	4	4	4	51
NUHA ZAHIRA SIMANJUNTA K	1	1	1	1	1	4	1	5	5	5	5	5	35
ELSA ARINI	2	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	44

[illegible]

Variabel Transparansi (X2)

NAMA	X2 .1	X2 .2	X2 .3	X2 .4	X2 .5	X2 .6	X2 .7	X2 .8	TOT AL X2
ELYSTINA SARI HASIBUAN	3	1	3	4	2	4	3	3	23
EFRILIA	4	3	3	4	3	4	4	4	29
RIZKY YAHYA PULUNGAN	2	1	2	4	5	5	4	4	27
TUA	1	2	2	4	4	5	5	4	27
MASNIARI	3	3	3	4	3	4	3	4	27
PIJORKOLING	1	1	2	4	1	5	5	4	23
WINDI RENA SIREGAR	1	1	2	4	2	4	4	4	22
ATIKA HARAHAAP	2	1	2	5	2	5	4	5	26
ARDIANSYAH HARAHAAP	1	2	3	5	2	5	3	4	25
FANDY RITONGA	1	1	2	4	1	4	3	4	20
NISA HARAHAAP	2	1	1	5	2	5	5	5	26
RINI	1	1	1	3	2	4	4	1	17
NUR AINUN LUBIS	2	1	1	3	2	3	3	3	18
EMMY KHOLILAH	1	2	2	4	2	4	4	4	23
AMINAH F RITONGA	2	1	2	4	3	5	4	5	26
SERI AYUMI SIREGAR	2	2	2	2	2	2	2	2	16
RUKIYAH TAMPUBOLON	2	2	2	4	2	4	4	3	23
NAMBA	1	1	1	3	2	4	3	4	19
HAIRUL AMIN HARAHAAP	4	4	4	4	4	5	5	5	35
ELITA	2	2	2	4	2	4	4	3	23
DODY ANUGERAH SIREGAR	1	1	2	3	2	4	3	4	20
AYU LESTARI LUBIS	2	2	2	4	2	4	4	4	24

KEMAL	1	1	2	4	2	4	3	3	20
GANI	4	2	2	2	2	4	1	3	20
AGUS	1	1	2	4	2	4	4	4	22
RISPAN	1	2	1	4	1	4	3	4	20
RIA HARAHAAP	2	2	2	4	2	4	3	3	22
YUSUF	2	2	2	4	2	4	4	3	23
ANDIKA	2	2	2	3	2	4	4	4	23
MULIA YUSUF	2	2	2	2	2	2	2	2	16
YULIANA SIREGAR	2	1	1	1	3	1	1	1	11
ANDINI SIREGAR	4	2	2	2	1	3	1	3	18
MITA FITRIANSYAH SIREGAR	4	4	2	4	4	5	2	4	29
RAHMADANI SIREGAR	1	1	2	4	1	5	4	4	22
NUR AISAH	1	2	1	3	1	4	2	4	18
RAJA OLOAN SIREGAR	2	1	1	4	2	4	2	4	20
WIRNA SARI SIREGAR	3	4	3	4	5	5	5	5	34
AULIA MELANI	4	4	4	4	4	4	4	3	31
IBADUL RAHMAN	5	4	4	4	2	4	3	3	29
AHMAD RAFLI	2	3	4	4	2	3	3	3	24
FEBRIANA PASARIBU	3	3	3	4	3	3	3	3	25
IDA AGUSTINA LUBIS	4	3	3	3	3	3	3	3	25
RONI ANUGRAH	3	4	4	4	2	2	2	2	23
MAHDI RIZKY	5	4	5	5	4	4	4	4	35
ALI MUDA	3	3	3	3	3	4	4	4	27
RITA SURYANI	1	3	2	3	4	4	4	4	25
DAMAN HURI PULUNGAN	3	2	2	2	2	2	2	2	17
INKA JUWITA	4	4	4	4	2	2	2	1	23

AZIZAH LUMBANTOBING	3	3	3	4	4	4	4	4	29
UMROH	1	2	2	3	3	4	2	2	19
NUR HABIBAH	4	4	4	2	2	2	2	2	22
NURCAHYA	3	3	2	2	2	4	4	4	24
MASITOH NASUTION	2	2	3	3	3	4	2	2	21
JAMILA SIMAMORA	2	2	3	3	3	4	3	3	23
DORIANI	3	3	3	3	3	4	4	4	27
YULIA ARDANI	3	4	4	4	4	4	4	4	31
WAHYUDI	3	4	4	3	4	5	3	3	29
SAHARA HARAHAHAP	3	3	3	4	3	4	2	2	24
MASDEWI SIMANJUNTAK	4	3	3	3	3	4	3	3	26
MAISON ALAMSYAH SIREGAR	4	2	3	3	3	4	2	3	24
FAHRI SYAH MUZZAKI	5	2	3	3	2	4	3	3	25
RIZKI MAULIDA	5	3	3	2	2	5	2	1	23
EFENDI	5	1	1	1	2	3	1	2	16
MARDIAH NASUTION	4	3	3	3	3	2	2	1	21
MELI HARAHAHAP	1	1	1	3	3	3	1	2	15
FITRI BATUBARA	1	1	1	3	1	3	1	5	16
WAHYU ANANDA SIREGAR	1	1	1	4	2	5	1	1	16
KHOIRUDDIN	5	5	5	5	5	5	5	5	40
NOSUDERA RAMBE	4	1	1	5	1	5	1	5	23
ANNISA ZULFAH	4	3	3	3	2	2	2	2	21
WIWING DEVIKA	5	3	3	3	1	1	1	1	18
HELMALIA PUTRI NASUTION	5	3	3	2	2	4	2	4	25
DINDA ARIYANI	5	2	2	2	3	4	2	4	24
NITA	4	2	2	2	2	4	2	5	23

DAMRI	3	3	3	3	3	4	4	3	26
AQILA	4	3	3	3	2	2	2	2	21
ARPEN	4	3	2	2	2	3	3	3	22
SAIMA PUTRI	2	2	3	3	3	3	2	4	22
FADHILA RIZKI	3	3	3	4	3	5	3	3	27
FADILLAH	4	4	4	3	3	3	2	2	25
WARDAH TUL JANNAH	2	2	2	4	2	4	2	4	22
MUHAMMAD JEFRI	3	3	3	5	3	4	2	4	27
NANDIRA	4	3	3	3	2	2	2	2	21
KAINA	1	1	1	1	1	3	1	5	14
SORAYA HUMAIRA	2	2	2	2	2	3	2	4	19
SASKIA	3	2	2	2	2	4	2	4	21
QORIAH AULIA	3	1	1	1	1	5	1	5	18
NUHA ZAHIRA SIMANJUNTAK	1	1	1	1	1	3	1	3	12
ELSA ARINI	2	2	2	2	2	3	2	3	18
ILHAM RIZKY	2	3	3	2	3	4	2	4	23
FADIL	1	3	3	1	3	5	2	5	23
AMMAR	2	2	3	3	4	4	2	4	24
RODIYAH	1	1	3	3	5	5	1	5	24
ULFA YANTI	2	4	4	4	2	4	2	4	26
NURJANNAH WITA	1	5	5	5	1	5	1	5	28
PRETTY OCTAWIFANY	2	2	3	4	2	4	5	4	26
UMMI PASARIBU	2	2	2	4	2	4	2	2	20
TIONIDA	2	2	2	3	2	3	2	4	20
NURIDA AMNAWITA	2	2	2	3	3	3	2	1	18

Variabel Akuntabilitas (X3)

NAMA	X3. 1	X3. 2	X3. 3	X3. 4	X3. 5	X3. 6	TOTA L X3
ELYSTINA SARI HASIBUAN	3	3	4	4	3	3	20
EFRILIA	3	3	4	3	4	3	20
RIZKY YAHYA PULUNGAN	1	2	4	5	5	4	21
TUA	1	2	4	4	5	4	20
MASNIARI	4	4	3	3	4	3	21
PIJORKOLING	2	1	5	5	5	5	23
WINDI RENA SIREGAR	1	2	4	4	4	4	19
ATIKA HARAHAHAP	1	1	5	4	5	4	20
ARDIANSYAH HARAHAHAP	1	1	4	4	4	3	17
FANDY RITONGA	2	1	4	4	4	2	17
NISA HARAHAHAP	1	2	5	4	4	5	21
RINI	1	2	5	4	5	5	22
NUR AINUN LUBIS	2	2	3	3	4	3	17
EMMY KHOLILAH	2	1	4	4	5	5	21
AMINAH F RITONGA	1	2	5	4	5	4	21
SERI AYUMI SIREGAR	4	2	2	2	2	2	14
RUKIYAH TAMPUBOLON	2	2	4	4	4	4	20
NAMBA	2	2	3	4	4	4	19
HAIRUL AMIN HARAHAHAP	4	4	4	4	5	5	26
ELITA	2	2	4	4	4	4	20
DODY ANUGERAH SIREGAR	2	2	4	4	4	4	20
AYU LESTARI LUBIS	2	2	3	4	3	3	17
KEMAL	2	2	3	3	4	4	18
GANI	2	2	3	1	3	2	13

AGUS	1	2	4	4	4	4	19
RISPAN	1	2	4	4	4	3	18
RIA HARAHAHAP	2	2	3	3	4	4	18
YUSUF	2	2	4	4	4	4	20
ANDIKA	3	3	3	3	4	3	19
MULIA YUSUF	4	2	4	2	4	4	20
YULIANA SIREGAR	2	1	3	4	4	4	18
ANDINI SIREGAR	2	1	4	4	3	3	17
MITA FITRIANSYAH SIREGAR	4	2	4	4	4	2	20
RAHMADANI SIREGAR	2	2	4	5	4	3	20
NUR AISAH	1	2	4	4	3	3	17
RAJA OLOAN SIREGAR	2	2	4	2	4	3	17
WIRNA SARI SIREGAR	4	4	4	4	4	4	24
AULIA MELANI	4	5	5	5	5	5	29
IBADUL RAHMAN	4	4	4	4	4	4	24
AHMAD RAFLI	3	4	3	2	2	2	16
FEBRIANA PASARIBU	4	4	5	5	5	5	28
IDA AGUSTINA LUBIS	4	4	4	4	4	4	24
RONI ANUGRAH	3	2	2	2	2	2	13
MAHDI RIZKY	4	4	4	4	4	4	24
ALI MUDA	4	5	5	5	5	5	29
RITA SURYANI	3	3	3	4	4	4	21
DAMAN HURI PULUNGAN	3	3	4	4	4	4	22
INKA JUWITA	3	3	4	4	4	4	22
AZIZAH LUMBANTOBING	4	3	3	4	4	4	22
UMROH	4	4	4	4	4	4	24
NUR HABIBAH	2	3	3	2	2	3	15

NURCAHYA	4	3	3	4	4	4	22
MASITOH NASUTION	2	2	3	2	2	2	13
JAMILA SIMAMORA	3	3	3	3	3	3	18
DORIANI	4	3	3	4	4	4	22
YULIA ARDANI	3	4	2	4	3	2	18
WAHYUDI	3	4	4	4	4	4	23
SAHARA HARAHAHAP	3	4	3	3	4	3	20
MASDEWI SIMANJUNTAK	4	4	4	4	4	4	24
MAISON ALAMSYAH SIREGAR	3	3	3	4	4	4	21
FAHRI SYAH MUZZAKI	4	4	4	4	4	4	24
RIZKI MAULIDA	3	3	3	3	3	3	18
EFENDI	3	4	4	4	4	4	23
MARDIAH NASUTION	4	4	4	4	4	4	24
MELI HARAHAHAP	1	3	2	1	1	1	9
FITRI BATUBARA	3	1	5	5	5	5	24
WAHYU ANANDA SIREGAR	1	3	3	1	1	1	10
KHOIRUDDIN	5	5	5	5	5	5	30
NOSUDERA RAMBE	1	1	5	5	5	5	22
ANNISA ZULFAH	4	3	3	5	5	5	25
WIWING DEVIKA	5	3	3	4	4	4	23
HELMALIA PUTRI NASUTION	5	2	4	4	3	3	21
DINDA ARIYANI	4	2	4	4	4	4	22
NITA	4	2	4	4	4	4	22
DAMRI	4	3	4	4	5	5	25
AQILA	5	5	4	4	4	4	26
ARPEN	4	3	2	2	4	4	19

SAIMA PUTRI	4	3	3	4	4	4	22
FADHILA RIZKI	4	5	5	5	5	5	29
FADILLAH	3	3	2	2	4	4	18
WARDAH TUL JANNAH	4	4	4	4	4	4	24
MUHAMMAD JEFRI	4	3	3	3	4	4	21
NANDIRA	4	3	3	5	5	5	25
KAINA	5	1	1	5	5	5	22
SORAYA HUMAIRA	4	2	2	4	4	4	20
SASKIA	2	3	3	3	2	2	15
QORIAH AULIA	1	3	3	5	3	3	18
NUHA ZAHIRA SIMANJUNTAK	5	3	3	1	1	1	14
ELSA ARINI	4	3	3	2	2	2	16
ILHAM RIZKY	4	2	4	4	4	4	22
FADIL	5	1	5	5	5	5	26
AMMAR	2	3	3	2	2	2	14
RODIYAH	1	3	3	1	1	1	10
ULFA YANTI	3	2	4	3	3	3	18
NURJANNAH WITA	3	1	4	3	3	3	17
PRETTY OCTAWIFANY	1	2	5	4	4	4	20
UMMI PASARIBU	2	3	3	2	2	2	14
TIONIDA	3	2	4	4	4	4	21
NURIDA AMNAWITA	2	3	2	2	2	2	13

Lampiran 3. Uji Statistik Deskriptif

Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TOTAL X1	99	30	60	46,66	5,966
TOTAL X2	99	11	40	22,96	4,840
TOTAL X3	99	9	30	20,14	4,167
TOTAL Y	99	7	24	14,07	3,198
Valid N (listwise)	99				

Lampiran 4. Uji Validitas

Uji Validitas

Pengelolaan Dana (Y)

		Correlations					
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	TOTAL Y
Y.1	Pearson Correlation	1	.125	-.106	-.077	-.081	.332**
	Sig. (2-tailed)		.218	.299	.450	.424	.001
	N	99	99	99	99	99	99
Y.2	Pearson Correlation	.125	1	.001	-.009	-.211*	.411**
	Sig. (2-tailed)	.218		.988	.929	.036	.000
	N	99	99	99	99	99	99
Y.3	Pearson Correlation	-.106	.001	1	.815**	.277**	.691**
	Sig. (2-tailed)	.299	.988		.000	.005	.000
	N	99	99	99	99	99	99
Y.4	Pearson Correlation	-.077	-.009	.815**	1	.394**	.738**
	Sig. (2-tailed)	.450	.929	.000		.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99
Y.5	Pearson Correlation	-.081	-.211*	.277**	.394**	1	.509**
	Sig. (2-tailed)	.424	.036	.005	.000		.000
	N	99	99	99	99	99	99
TOTAL Y	Pearson Correlation	.332**	.411**	.691**	.738**	.509**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000	.000	
	N	99	99	99	99	99	99

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Partisipasi Masyarakat (X1)

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X1.11	X1.12	TOTAL X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.144	.116	.041	.383**	.204*	.227*	.051	.059	-.098	.066	.204*	.431**
	Sig. (2-tailed)		.156	.254	.686	.000	.043	.024	.615	.565	.335	.513	.043	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
X1.2	Pearson Correlation	.144	1	.658**	.378**	.113	.038	.013	-.081	.028	.074	-.191	-.142	.262**
	Sig. (2-tailed)	.156		.000	.000	.265	.711	.896	.428	.786	.465	.059	.160	.009
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
X1.3	Pearson Correlation	.116	.658**	1	.596**	.247*	.186	.076	.028	.196	.168	-.029	-.117	.422**
	Sig. (2-tailed)	.254	.000		.000	.014	.066	.455	.785	.051	.096	.778	.249	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
X1.4	Pearson Correlation	.041	.378**	.596**	1	.379**	.311**	.222*	.188	.169	.147	.077	.093	.523**
	Sig. (2-tailed)	.686	.000	.000		.000	.002	.027	.063	.095	.148	.447	.358	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
X1.5	Pearson Correlation	.383**	.113	.247*	.379**	1	.699**	.314**	.181	.148	-.037	.191	.290**	.651**
	Sig. (2-tailed)	.000	.265	.014	.000		.000	.002	.072	.143	.713	.058	.004	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
X1.6	Pearson Correlation	.204*	.038	.186	.311**	.699**	1	.226*	.208*	.194	.090	.192	.282**	.586**
	Sig. (2-tailed)	.043	.711	.066	.002	.000		.025	.039	.054	.376	.057	.005	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
X1.7	Pearson Correlation	.227*	.013	.076	.222*	.314**	.226*	1	.536**	.368**	.281**	.512**	.605**	.738**

	Sig. (2-tailed)	.024	.896	.455	.027	.002	.025		.000	.000	.005	.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
X1.8	Pearson Correlation	.051	-.081	.028	.188	.181	.208*	.536**	1	.467**	.276**	.450**	.530**	.601**
	Sig. (2-tailed)	.615	.428	.785	.063	.072	.039	.000		.000	.006	.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
X1.9	Pearson Correlation	.059	.028	.196	.169	.148	.194	.368**	.467**	1	.575**	.127	.065	.492**
	Sig. (2-tailed)	.565	.786	.051	.095	.143	.054	.000	.000		.000	.211	.521	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
X1.10	Pearson Correlation	-.098	.074	.168	.147	-.037	.090	.281**	.276**	.575**	1	.266**	.157	.401**
	Sig. (2-tailed)	.335	.465	.096	.148	.713	.376	.005	.006	.000		.008	.120	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
X1.11	Pearson Correlation	.066	-.191	-.029	.077	.191	.192	.512**	.450**	.127	.266**	1	.768**	.559**
	Sig. (2-tailed)	.513	.059	.778	.447	.058	.057	.000	.000	.211	.008		.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
X1.12	Pearson Correlation	.204*	-.142	-.117	.093	.290**	.282**	.605**	.530**	.065	.157	.768**	1	.636**
	Sig. (2-tailed)	.043	.160	.249	.358	.004	.005	.000	.000	.521	.120	.000		.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
TOTAL X1	Pearson Correlation	.431**	.262**	.422**	.523**	.651**	.586**	.738**	.601**	.492**	.401**	.559**	.636**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.009	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Transparansi (X2)

Correlations

[illegible]

TOTAL X2	Pearson Correlation	.387**	.653**	.707**	.584**	.622**	.525**	.623**	.431**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Akuntabilitas (X3)

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	TOTAL X3
X3.1	Pearson Correlation	1	.473**	-.097	.161	.181	.255*	.546**
	Sig. (2-tailed)		.000	.337	.111	.074	.011	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99
X3.2	Pearson Correlation	.473**	1	-.010	-.002	-.033	.048	.395**
	Sig. (2-tailed)	.000		.921	.985	.744	.641	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99
X3.3	Pearson Correlation	-.097	-.010	1	.535**	.529**	.497**	.567**
	Sig. (2-tailed)	.337	.921		.000	.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99
X3.4	Pearson Correlation	.161	-.002	.535**	1	.789**	.761**	.798**
	Sig. (2-tailed)	.111	.985	.000		.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99
X3.5	Pearson Correlation	.181	-.033	.529**	.789**	1	.895**	.826**
	Sig. (2-tailed)	.074	.744	.000	.000		.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99
X3.6	Pearson Correlation	.255*	.048	.497**	.761**	.895**	1	.855**
	Sig. (2-tailed)	.011	.641	.000	.000	.000		.000
	N	99	99	99	99	99	99	99
TOTAL X3	Pearson Correlation	.546**	.395**	.567**	.798**	.826**	.855**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	99	99	99	99	99	99	99

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 5. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas

Pengelolaan Dana (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,771	5

Partisipasi Masyarakat (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,768	12

Transparansi (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,845	8

Akuntabilitas (X3)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,740	6

Lampiran 6. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,85391646
Most Extreme Differences	Absolute	,079
	Positive	,079
	Negative	-,046
Test Statistic		,079
Asymp. Sig. (2-tailed)		,129 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

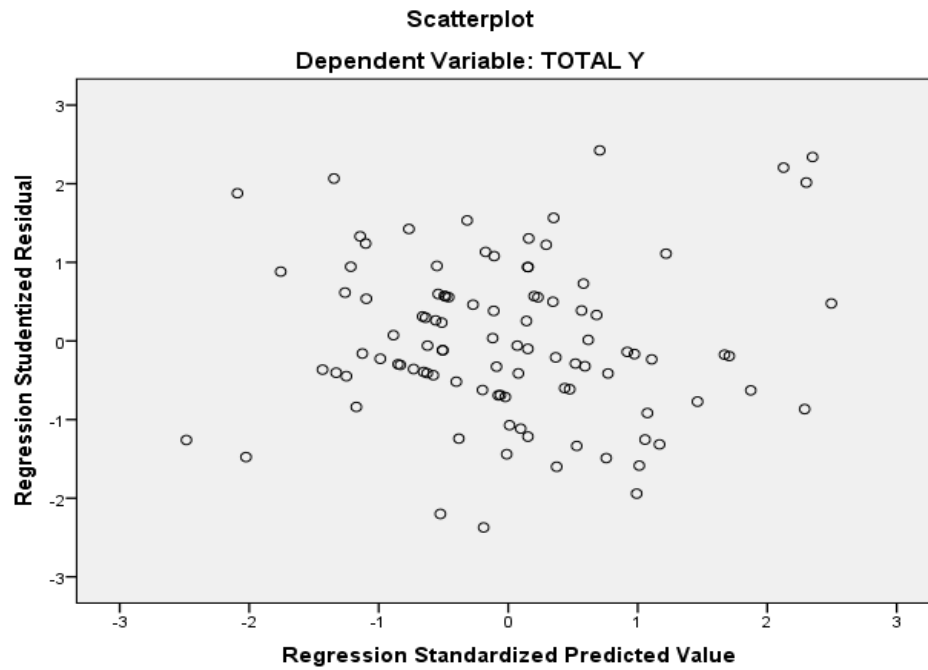
Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	13,831	2,496		5,542	,000		
	TOTAL X1	-,118	,052	-,220	-2,268	,026	,890	1,124
	TOTAL X2	,316	,068	,478	4,613	,000	,781	1,280
	TOTAL X3	-,075	,081	-,097	-,926	,357	,758	1,320

a. Dependent Variable: TOTAL Y

Uji Heteroskedastisitas



Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,831	2,496		5,542	,000
	TOTAL X1	-,118	,052	-,220	-2,268	,026
	TOTAL X2	,316	,068	,478	4,613	,000
	TOTAL X3	-,075	,081	-,097	-,926	,357

a. Dependent Variable: TOTAL Y

Lampiran 7. Uji Hipotesis

Uji Parsial

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,831	2,496		5,542	,000
	TOTAL X1	-,118	,052	-,220	-2,268	,026
	TOTAL X2	,316	,068	,478	4,613	,000
	TOTAL X3	-,075	,081	-,097	-,926	,357

a. Dependent Variable: TOTAL Y

Uji Simultan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	204,311	3	68,104	8,106	,000 ^b
	Residual	798,194	95	8,402		
	Total	1002,505	98			

a. Dependent Variable: TOTAL Y

b. Predictors: (Constant), TOTAL X3, TOTAL X1, TOTAL X2

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,451 ^a	,204	,179	2,899

a. Predictors: (Constant), TOTAL X3, TOTAL X1, TOTAL X2

b. Dependent Variable: TOTAL Y



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 1436 /Un.28/G.1/G.4c/TL.00.9/05/2025

22 Mei 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Mohon Izin Riset

Yth; Lurah Kelurahan Panyanggar Kota Padangsidempuan.
Di Tempat

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : Sona Indah Yuspra

NIM : 2140600012

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Adalah benar Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "**Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Keuangan**". Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberi izin riset dan data pendukung sesuai dengan judul di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
NIP. 197905252006041004

Tembusan :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Isla



**PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
KELURAHAN PANYANGGAR**

Jalan Ompu Napotar Padangsidempuan Kode Pos 22714

Padangsidempuan, 23 Mei 2025

Nomor : 470/118/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Balasan Riset

Yth : : Bpk/Ibu/ Wali Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan
Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Dengan hormat, bahwa Bersama ini kami sampaikan kepada Bpk/Ibu Bahwa nama yang tersebut di bawah ini :

Nama : SONA INDAH YUSPRA
Nim : 2140600012
Program Studi : AKUNTANSI SYARIAH
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Adalah benar Mahasiswa Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang melakukan/ menyelesaikan Riset (Skripsi) dengan Judul “ Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Di Kelurahan Panyanggar, dan dengan surat balas ini kami memberikan Izin Riset tersebut.

Demikian surat balasan ini kami perbuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat di gunakan seperlunya.



LURAH KELURAHAN PANYANGGAR

KHOIRUDDIN,AMd
NIP : 19850215 201001 1 013

Lampiran 10. Dokumentasi Penyebaran Kuesioner



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Sona Indah Yuspra
2. NIM : 21 406 00012
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 31 Januari 2003
5. Anak Ke : 2 dari 2 bersaudara
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Status : Mahasiswa
8. Agama : Islam
9. Alamat Lengkap : Jl. Persatuan Kel. Panyanggar Padangsidempuan
10. Nomor Handphone : 0812-6262-4746
11. Email : sonaindahyuspra2003@gmail.com

II. IDENTITAS ORANG TUA

1. Ayah
 - a. Nama : Muhammad Yusup Simamora
 - b. Pekerjaan : Wiraswasta
 - c. Alamat : Jl. Persatuan Kel. Panyanggar Padangsidempuan
 - d. Nomor Handphone : -
2. Ibu
 - a. Nama : Rita Suryani
 - b. Pekerjaan : Wiraswasta
 - c. Alamat : Jl. Persatuan Kel. Panyanggar Padangsidempuan
 - d. Nomor Handphone : 0822-7622-8552

III. PENDIDIKAN

1. Tahun 2009-2015 : SD Negeri 200112 Padangsidempuan
2. Tahun 2015-2018 : SMP IT Darul Hasan Padangsidempuan
3. Tahun 2018-2021 : SMK Negeri 1 Padangsidempuan
4. Tahun 2021-2025 : S1 Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan